

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2018

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2018 merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang ketiga untuk periode perencanaan sesuai Revisi Renstra tahun 2015-2019. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2018 Dinas Pendidikan. Selain capaian kinerja tahun 2018, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2015-2019 Dinas Pendidikan.

Tahun 2018 Dinas Pendidikan melaksanakan tujuh program pembangunan pendidikan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Pendidikan sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun–tahun mendatang.

Tantangan seperti memperbaiki layanan pendidikan bermutu sesuai dengan SPM dan SNP, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disemua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,

peningkatan mutu pendidikan. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan selama tahun 2018. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

RUDYANTO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 196403 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN 2
B. PERMASALAHAN BIDANG PENDIDIKAN 9
C. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2017 10
D. SISTEMATIKA PENULISAN LKJ-IP 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
A. REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2019 13
1. Visi dan Misi 13
2. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Sesuai Revisi Renstra Tahun 2015-2019 14
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2018 28
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN AKSEBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN 30
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat 31
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Sederajat 34
3. Sekolah SMA dan SMK yang terkreditasi Minimal B 40
C. CAPAIAN KINERJA ESELON III SESUAI PERJANJIAN KERJA 46
D. AKUNTANBILITAS KEUANGAN 51
BAB IV PENUTUP 58

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
2.1	Program dan Bidang	15
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018.....	16
2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018 (Eselon III)	17
2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018 (Eselon IV)	20
2.5	Program dan Pagu Dana Tahun 2017	26
3.1	Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Riau Tahun 2018 sesuai Revisi Renstra Tahun 2015-2019	29
3.2	Capaian Kinerja APK Sekolah Menengah Sederajat.....	31
3.3	Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018.....	32
3.4	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018	33
3.5	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018	35
3.6	Perbandingan Perkembangan APM Sekolah Menegah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018.....	36
3.7	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018	37
3.8	Tabel Capaian Persentase SMA/SMK Terakreditasi minimal B	41
3.9	Persentase Nilai Akreditasi SMA se Provinsi Riau Tahun 2018.....	42
3.10	Perkembangan Persentase Nilai Akreditasi SMA se Provinsi Riau Tahun 2015-2018.....	42
3.11	Persentase Nilai Akreditasi SMK se Provinsi Riau Tahun 2018	43
3.12	Perkembangan Persentase Nilai Akreditasi SMK Se Provinsi Riau Tahun 2015-2018.....	44
3.13	Capaian Kinerja Eselon III (Sekretaris).....	46
3.14	Capaian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang SMA).....	47
3.15	Capaian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang SMK).....	49
3.16	Capaian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang PKLK).....	50
3.17	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2018	51

3.18 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2018 52
3.19 Realisasi APBD Belanja Langsung Tahun 2014 – 2018 .....
3.20 Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau Semester II Tahun 2018..... 55
4.1 Rekapitulasi Tingkat Pencapaian IKU Selama Tahun 2018..... 58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau	9

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK		HALAMAN
3.1	Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018.....	32
3.2	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018	34
3.3	Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018.....	36
3.4	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018	38
3.5	Persentase Nilai Akreditasi SMA se Provinsi Riau Tahun 2018.....	42
3.6	Persentase Nilai Akreditasi SMK se Provinsi Riau Tahun 2018	43

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Revisi Renstra Tahun 2015-2019

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

3 Pengukuran Kinerja Tahun 2018

BAB I

BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, batang tubuh konstitusi tersebut pada pasal 20, pasal 21, pasal 28 c ayat (1), pasal 31 dan pasal 32 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku OPD penyelenggara bidang Pendidikan menyelenggarakan layanan pendidikan, antara lain adalah ketersediaan layanan pendidikan bermutu, terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pembangunan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka peningkatan sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup, tercapainya suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab secara harmonis dalam berkehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Selaku penyelenggara di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan harus melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan memberikan laporan kinerja. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2015 menggambarkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang Tahap II (2010 – 2015) dan III (2015 – 2020) dengan fokus pada penguatan pelayanan dan daya saing regional , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2015 – 2019, dan dengan mempertimbangkan adanya

pergeseran orientasi dari berdasarkan sisi pasokan *(supply oriented)* bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan *(demand oriented),* Dinas Pendidikan telah merencanakan pembangunan pendidikan secara menyeluruh dengan cara memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

2.1.1 Tugas Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat {1) Dinas Pendidikan menyeleggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, sidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;

   b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;

   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

   d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan,terdiri atas:
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Perencanaan Program
      2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah; dan
      3. Subbagian Kepengawaian Umum
   c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
   d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
   e. Bidang Pembinaan Pendidil<an Khusus dan Pendidikan layanan Khusus.
   f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
   g. Cabang Dinas.
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretsriat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Bidang dibantu oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)
6. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
7. Kepala Subbagian merupakan Penjabat Pengawas (eselon IV.a).

2.1.3. Tugas dan Fungsi sesuai susunan organisasi

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pcmerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang pendidikan**.**
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, peLaksanaan evaluasi dan pelaporan, peleksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan.

3. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencaaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

   a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.

   b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.

   c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporen pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

   d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5. Kepala Subbagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas :

   a. merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program.

   b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkurrgan Subbagian Perencanaan Program.

   c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program / kegiatan dari masing masing bidang.

   d. melaksanakan penyusunan rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja.

   e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.

   f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.

   g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program dan;

   h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :

   a. merecanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

   b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan PengeloLaan Barang MiLik Daerah.

   c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.

   d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.

e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.

f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.

g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan.

h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran dala hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi.

j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungJawaban anggaran.

k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset.

i. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.

m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaa tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuail tugas dan fungsinya.

7. Kepala Subbagian Kepengawaian dan Umum Mempunyai Tugas :

a. merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.

d. melaksanakan fasilitasi administrasj kepegawaian.

e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pengawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.

f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.

g. membuat laporan perkembangan kepengawaian.

h. menyelenggarakan urusan kehumasan.

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.

j. meLaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanaan dinas.

k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

l. mengumpulkan, meny usun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.

m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.

n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyeleggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

- menyusun bahan perumusan koordinasi pencapaian kurikulum, pembinaan, permantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karekter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas.

- menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas.

- penyelenggaraan pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi.

- penyusunan prograrn kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

- penyelenggaraan koordisi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

- menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

- menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan.

- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan peLaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan dan Pendidikan Layanan Khusus.

a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mcmpunyai tugas melakukan, koordinai, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus;

- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidlikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

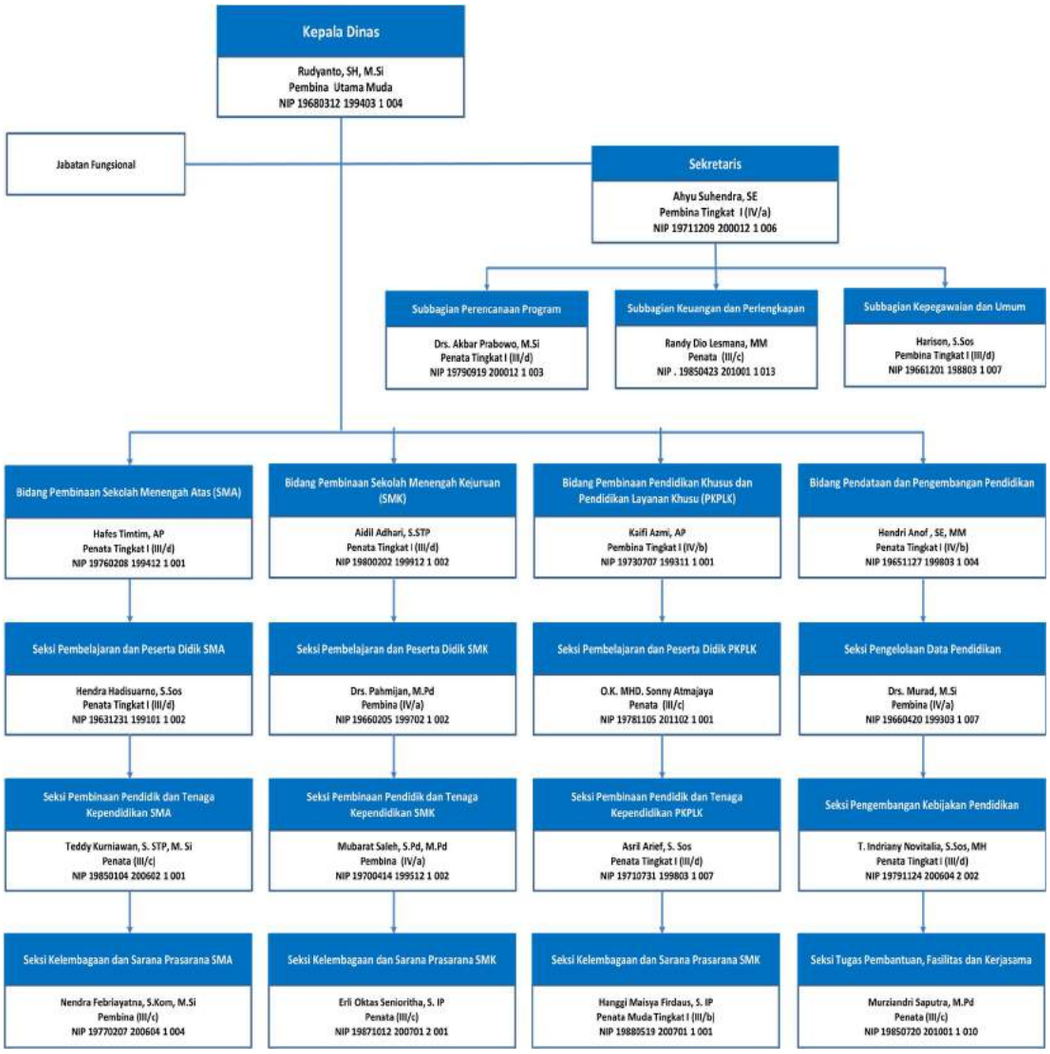
a. Kepala Bidang Pendalaan dan pengembangan pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau

b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (l) Kepala Bidang Pendataan dan pengembangan Pendidikan menyelenggaraan fungsi;

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendataan dan pengembangarr Pendidikan;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan dan Pengembangan pendidikan;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, analisis, sinkronisasi dan neraca pendidikan daerah pelaksanaan kebijakan pengelola data pendidikan, Pengembangan Kebijakan pendidikan dan fugas pembantuan, fasililasi dan kerjasama pendidikan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pembangunan dan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- melakukan penyebarluasan informasi dan pokok pendidikan dan profil pendidikan Provinsi Riau;
- menyusun kelender pendidikan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau



B. Permasalahan Bidang Pendidikan

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan akses dari jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya penyediaan sarana dan prasana di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil, penyebaran guru yang belum merata.

C. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2017

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2016 oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Nilai hasil evaluasi AKIP pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, adalah 66,50 atau termasuk kategori B (Baik), yaitu akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki dan menerapkan suatu sistem/mekanisme yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, namun perlu beberapa perbaikian yang tidak mendasar, sehingga direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen Renstra untuk keperluan penyusunan dokumen Renstra selanjutnya dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah; LKjIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2108
2. Melakukan reviu terhadap dokumen Renstra untuk memperbaiki penetapan indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) sesuai kriteria indikator kinerja yang baik dan menetapkan target kinerja dengan baik;
3. Memanfaatkan dokumen Renstra-SKPD sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD;
4. Mempublikasikan dokumen-dokumen perencanaan OPD (Renstra/ RKT/Renja/PK), dokumen-dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) dan dokumen informasi kinerja (LKjIP) SKPD, laporan keuangan (LRASKPD) melalui website sehingga dapat dikases dan diunduh oleh publik;
5. Melakukan reviu terhadap dokumen IKU-SKPD yaitu menetapkan indikator-indikator kinerja utama dari indikator-indikator sasaran yang ada dalam dokumen Renstra-OPD;
6. Memanfaatkan IKU-SKPD yang sudah ditetapkan untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen penganggaran serta untuk penilaian kinerja unit kerja serta untuk keperluan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;

7. Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja masing-masing sasaran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)-OPD;
8. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja guna mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel;
9. Membangun database kinerja, sebagai data dukung untuk evaluasi, penilaian dan perencanaan kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Sebagai tindaklanjut hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menyusun instrumen Rencana Aksi perbaikan terhadap pelaksanaan AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2018 ini. Rencana aksi tersebut, sebagai berikut :
    1. Reviu Dokumen Renstra : revisi RPJMD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Pendidikan, guna terselenggaranya perencanaan pembangunan pendidikan yang komprehensif, terstruktur dan akuntabel, disamping itu sebagai akibat dinamika perubahan regulasi terkait kewenangan pemerintah daerah serta akselerasi pencapaian visi / misi pembangunan pendidikan;
    2. Integrasi indikator kinerja Renstra dalam dokumen penganggaran;
    3. Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan, memberikan instruksi kepada tim Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kehumasan segera mempublikasikan dokumen-dokumen tersebut dalam website disdik.riau.go.id;
    4. IKU : melakukan reviu terhadap IKU Dinas Pendidikan dengan mengintegrasikannya IKU dalam revisi dokumen Renstra dan mempedomani IKU dalam penyusunan;
    5. Penjabaran informasi keuangan : menginstruksikan kepada Tim Penyusun LKjIP Dinas Pendidikan, agar menyajikan informasi keuangan yang dijabarkan dalam setiap pencapaian sasaran program Renstra;
    6. Kompetensi SDM AKIP : mengikutsertakan PNS potensial di lingkungan Dinas Pendidikan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis dan workshop terkait SAKIP;

7. Database pendidikan : menyusun sistem informasi pendataan bidang pendidikan melalui inovasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dituangkan dalam buku saku pendidikan.

D. Sistematika Penulisan LKj-IP

Analisis atas capaian kinerj**a terhadap rencana** kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I,

PENDAHULUAN, menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, issue strategis bidang Pendidikan, rencana tindak lanjut hasil evaluasi AKIP, dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II,

PERENCANAAN KINERJA, dijelaskan mengenai perencanaan strategis dan perjanjian kinerja Tahun 2018. Pada bab ini akan disampaikan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan serta perjanjian kinerja Kepala Dinas dalam dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018.

BAB III,

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018, diuraikan terkait tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas pendidikan beserta evaluasi dan analisis capaian kinerja disertai pemecahan masalah dan solusinya, analisis efisien dan efektifitas, serta akuntabilitas kinerja keuangan.

BAB IV,

PENUTUP, mengemukakan tinjauan umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan adanya perencanaan kinerja ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas dan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan kinerja dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau merevisi RPJMD dan mengacu pada perubahan RPJMD, Dinas pendidikan melakukan revisi Renstra untuk Periode Tahun 2015-2019.

A. Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015-2019

Adapun komponen-komponen Revisi RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Riau tersebut, antara lain dapat digambarkan seperti dibawah ini :

1. Visi dan Misi

Mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan serta mencermati kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal yang ada, dan keinginan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk ikut berkiprah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan visi pendidikan nasional, serta visi Kemendiknas tahun 2019, yaitu**:** "**Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan**

Berlandaskan GotongRoyong" Selain itu tema pembangunan yang ketiga (2015—2019) difokuskan pada Daya Saing Regional Pendidikan dan Kebudayaan.Oleh karena itu, berdasarkan visi dan misi bidang pendidikan Gubernur Provinsi Riau serta visi Kemdikbud tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan tahapan dan tema pembangunan jangka panjang, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut: **"Terwujudnya Layanan Mutu Pendidikan Provinsi Riau yang Berdaya Saing."**

Dengan visi itu, Dinas Pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam mengembangkan sumberdaya manusia, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, meningkatkan tata kelola dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Dengan demikian Dinas Pendidikan dapat menjadi lembaga/Dinas yang unggul dalam membentuk insan indonesia yang cerdas, dan kompetitif sebagaimana visi yang diemban oleh Kemendikbud Tahun 2019.

Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua unsur yang ada di Dinas Pendidikan. Untuk mencapai visi tersebut, dan sejalan dengan misi Kemendikbud, maka **Misi Dinas Pendidikan** "Meningkatkan Pelayanan Pendidikan".

2. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Sesuai Revisi Renstra Tahun 2015-2019

Tujuan Dinas Pendidikan menurut revisi Renstra Tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Sasaran Dinas Pendidikan yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dengan strategi Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan Mutu Pendidikan.

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan menurut Revisi Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan
3. Meningkatkan kesesuaian layanan pendidikan dengan lapangan pekerja
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan
5. Meningkatkan tata kelola manajemen layanan pendidikan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan tahun 2015-2019 dan sumber daya anggaran (murni) yang ada, Disdik telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2018 . Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 tersebut, Disdik Provinsi Riau mengalokasikan total penganggaran dari APBD (anggaran murni) sebesar Rp. 941.314.146.827,67,-.

Untuk membiayai 7 Program baik program non urusan maupun urusan wajib. Dengan adanya perubahan kewenangan urusan Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan pada tahun 2018 melaksanakan 7 (delapan) program, terdiri dari 3 (tiga) program non urusan dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.167.284.400,-, 4 (empat) program urusan wajib, dengan alokasi dana sebesar Rp. 928.146.862.427,67 dan ke 7 program tersebut dilaksanakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan Disdik Provinsi Riau. Selain menjalankan 7 program sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendidikan juga menjalankan 3 (tiga) program dengan sumber dana dari APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 8.323.340.000,. Adapun program, pelaksana program dan alokasi dana secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Program dan Bidang

No	Program	Bidang/UPT Pelaksana
Program Non Urusan		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Sekretariat
Program Urusan Wajib		
4	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan Menengah

No	Program	Bidang/UPT Pelaksana
5	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	PKPLK
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendataan
7	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	SMA
Program dengan dana APBN		
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	SMA, SMK dan PKLK
2	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Pendatan
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Sekretariat

Isi dari perjanjian kinerja tahun 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN (Rp)
	(1)	(2)		(3)	(4)
1.	**Meningkat Mutu dan Akses Pendidikan**	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) :		915,596,282,426.67
			- SMA/ SMK/ MA/SMLB/Paket C	93.41%	
		2.	Angka Partisipasi Murni (APM) :		
			- SMA/ SMK/ MA/SMLB/Paket C	70.43%	
		3.	Persentase Sekolah yang terakreditasi B		
			- SMA/SMK	95.00%	
			- SMK	45.40%	

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan
Esselon III
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
	Sekretariat			
1	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), Jumlah penghasilan yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan	1 Kegiatan	496,702,400
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kegiatan	10,662,043,900
3	Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Sarana Pendidikan	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Jumlah Sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal	3 Kegiatan	2,008,538,100
4	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5 Kegiatan	4,544,203,730
5	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah	1 Kegiatan	16,985,574,000
	Bidang SMA			
6	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	4 Kegiatan	10,899,081,400

7	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	23 Kegiatan	654,203,299,100
	Bidang SMK			
8	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	3 Kegiatan	6,799,832,400
9	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	12 Kegiatan	133,508,448,566.67
	Bidang PKPLK			
10	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	2 Kegiatan	5,601,229,600

11	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi		16,181,575,000
12	Meningkatnya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Terlaksananya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	25 Kegiatan	8,115,534,030
	Bidang Data			
13	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	7 Kegiatan	500,000,000
14	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi manajemen berbasis	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	22 Kegiatan	50,066,662,600

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan
Esselon IV
Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
Sekretariat				
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	2,152,200,000
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	1,036,000,000
3	Terlaksananya Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Bulan	250,000,000
4	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	900,000,000
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	12 bulan	1,120,000,000
6	Terlaksananya Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	12 bulan	1,730,372,900
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	978,471,000
8	Terlaksananya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	Tersedianya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	12 bulan	400,000,000
9	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	400,000,000
10	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	500,000,000
11	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	Tersedianya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	12 bulan	489,988,000

12	Terlaksananya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	250,000,000
13	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal dan Informal	Tersedianya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	12 Bulan	146,702,400
14	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	Tersedianya Pembinaan Jasmani dan Rohani	12 Bulan	350,000,000
15	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	305,000,000
16	Terlaksananya Pengadaan Kelender Pendidikan	Tersedianya Pengadaan Kelender Pendidikan	17.047 eks	295,367,000
17	Pengelolaan Data Pendidikan	Tersedianya Data Pokok Pendidikan	200 Buku Profil	1,086,777,100
18	Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastuktur Berbasis Mading Digital Interaktif	Tersedianya Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastuktur Berbasis Mading Digital Interaktif	3 Sekolah	162,000,000
19	Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	Terlaksananya Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	1 Dokumen	1,433,904,400
20	Terlaksananya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	12 Kab/ Kota	826,167,230
21	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	Terlaksananya Sistem Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	10 Sekolah	16,985,574,000
22	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	12 Bulan	100,000,000
23	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan	100,000,000
24	Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset	Tersedianya Penyusunan Laporan Aset	12 Bulan	150,000,000
BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS				
1	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	1 Kegiatan	1,955,452,300
2	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Nasional SMA/MA/SMK	12 Kab/Kota	93,216,800
3	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) SMA	12 Kab/ Kota	2,675,505,000

4	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	Jumlah sekolah yang mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	1 Kegiatan	590,087,800
5	Terlaksanaaanya Pengadaan Alat Kesenian SMA	Jumlah Alat Kesenian SMA	12 Kab/Kota	196,802,000.00
6	Terlaksanaanya Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/MA/SMK	8 Bidang Lomba	588,265,600
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah Siswa yang diberi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12 Kab/Kota	242,634,600,000
8	Terlaksananya Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	Tersedianya Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan BOS	12 Kab/Kota	236,483,982,600
9	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA	Tersedianya Prasarana Gedung Sekolah SMA	1 Paket	1,720,858,000
10	Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tersedianya Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	30 orang	576,346,400
11	Terlaksananya Kualifikasi S2 Terakreditasi	Tersedianya Kualifikasi S2 Terakreditasi	112 Orang	6,066,706,000
12	Festival Lomba Seni Siswa Nasioal (FLS2N) SMA	Tersedianya Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2SN) SMA	12 Kab/Ko (6 Mendali)	1,580,524,000
13	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	Tersedianya Kurikulum 2013 SMA	12 Kab/ Kota (280) Guru	778,409,000
14	Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	Tersedianya Guru Bimbingan Konseling SMA	12 Kab/Ko (60 Guru)	196,300,200
15	Terlaksananya MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	Jumlah Guru yang mengikuti MGMP Mata Pelajaran SMA	12 Kab/Ko (150 Guru)	484,572,800
16	Rehabilitas Sedang/ Berat Ruang Kelas SMA	Tersedianya Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas SMA	10 Kabupaten (20 sekolah)	5,166,032,000
17	Terlaksananya Penyelenggaran Pendidikan SMA (DAK)	Tersedianya Penyelanggaraan Pendidikan SMA (DAK)	103 Sekolah	33,208,970,000
18	Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	Tersedianya Mebeuler Sekolah SMA	15 Sekolah	2,939,110,000
19	Terlaksanaanya Peningkatan Infrastruktur SMA	Tersedianya Infrastruktur SMA	12 Sekolah	8,124,766,000
20	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMA	Tersedianya Pagar SMA	34 Sekolah	10,283,480,000

21	Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	Tersedianya Alat Peraga IPA SMA	22 Sekolah	1,675,000,000
22	Terlaksananya Pembangunan USB SMA dan Kelengkapanya	Jumlah Pembangunan USB	5 Sekolah	30,640,044,000
23	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Jumlah Pembangunan RKB	47 Sekolah	23,966,996,000
24	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	1 Sekolah	489,958,000
25	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	Tersedianya Prasarana Labor IPA SMA	10 Sekolah	2,999,880,000
26	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Media Pembelajaran SMA	46 Sekolah	47,986,636,000
27	Pembangunan Perpustakaan	Tersedianya Ruangan Perpustakaan SMA	1 Sekolah	999,880,000
BIDANG SEKOLAH MEMENGAH KEJURUAN				
1	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Tersedianya Perlombaan Olahraga Nasional (O2SN) SMK	30 Orang	1,666,735,300
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Tersedianya Perlombaan Seni Siswa Nasional (FLS2SN) SMK	9 Bidang lomba	1,260,097,100
3	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	Tersedianya Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi	130 Mahasiswa	3,489,000,000
4	Terlaksananya MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	Jumlah Guru yang mengikuti MGMP Mata Pelajaran SMK	60 orang	496,254,600
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	160 Siswa	4,478,960,600
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	1 Sekolah	1,477,863,700
2	Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	Jumlah Mebeuler Sekolah SMK	9 Sekolah	1,759,319,300
3	Terlaksananya Penyelenggaran Pendidikan SMK (DAK)	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	59 Sekolah	39,816,043,000
4	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMK	Tersedianya Media Pembelajaran SMK	59 Sekolah	30,914,000,000
5	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembelajaran	41 Sekolah	34,431,890,200

	Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	Praktek Produktif SMK		
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	1 Kegiatan	6,024,000,000
7	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMK	Jumlah Pembangunan Pagar SMK	5 Sekolah	3,873,000,000
8	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur SMK	Tersedianya Peningkatan Infrastruktur SMK	105 Orang	5,396,666,667
9	Pengadaan Alat Labor SMK	Tersedianya Alat Labor SMK	4 Sekolah	1,168,450,500
10	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	83 Ruang	4,056,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS				
1	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	157 Siswa	573,632,200
2	Terlaksananya Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	Jumlah yang mengikuti Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	4 Bidang Lomba (175 orang Tk. Provinsi dan 40 untuk Tk. Nasional	1,947,968,930
3	Terlaksananya Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	Jumlah yang mengikuti Festifal Inovasi dan Kreaktifitas PKPLK	6 Bidang Lomba	539,857,200
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	300 Siswa	5,496,439,000
1	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	Tersedianya Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	204 orang	4,773,422,000
2	Terlaksananya Apresiasi GTK Paud Dikmas dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	Tersedianya Apresiasi GTK Paud Dikmas dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se- Provinsi Riau	13 GTK Paud (156 orang)	827,807,600
3	Terlaksananya Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	Tersedianya Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	240 orang	442,625,700

4	Terlaksanaanya Pengadaan Alat Kesenian PKPLK	Tersedianya Alat Kesenian PKPLK	1 Sekolah	250,000,000
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA NEGERI PLUS Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	300 Siswa	5,697,300,000
2	Terlaksananya Penyelenggaraan SMA Pintar	Tersedianya Penyelenggaraan SMA Pintar	216 Siswa	4,987,836,000
3	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	Tersedianya Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	3 Sekolah	400,000,000
4	Terlaksana Pengadaan Meubiler SLB	Tersedianya Meubiler SLB	13 Sekolah	1,763,000,000
5	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	Tersedianya Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	12 Bulan	1,275,250,000
6	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	12 Bulan	923,200,000
BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN				
1	Terlaksananya PPDB On Line SMA/SMK	Tersedianya PPDB On Line SMA/SMK	140 Sekolah	500,000,000
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	300 orang	1,382,341,500
3	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	180 orang	840,883,600
4	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	Jumlah Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	36 orang (3 cabang)	98,947,000
5	Meningkatnya Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	Tersedianya Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	12 Bulan	847,866,000
6	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	6 Cabang (12 orang)	832,632,800
7	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	144 orang	1,277,278,000
8	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/SMP dan UJIAN PAKET A/B/C	Jumlah Siswa yang mengikuti (USBN) SD/SMP dan Ujian Paket	2.054 orang	670,196,050
9	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	288 Orang	1,282,048,600

10	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	Jumlah Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan dalam Provinsi	2.913 orang	24,247,268,350
11	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	Jumlah Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	382 orang	8,401,747,100
12	Terlaksananya Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Jumlah Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	897 orang	9,100,000,000
13	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	5 Cabang (10 orang)	1,085,453,600

Tabel 2.5
Program dan Pagu Dana Tahun 2018

Dengan Program dan Pagu Dana sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.13.810.900.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.1.650.000.000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp.1.213.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.510.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.510.000.000	APBD
6	Program pendidikan menengah	Rp.819.641.812.664	APBD
7	Program Pendidikan Khusus dan layanan Khusus	Rp.99.200.300.000	APBD
8	Program Manajemen pelayanan pendidikan	Rp.229.967.286.200	APBD
9	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp.6.081.871.000	APBN

No.	Program	Anggaran	Ket.
10	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp.1.940.688.000	APBN
11	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Rp.300.781.000	APBN

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2018, Dinas Pendidikan berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis beserta indikator kinerja utamanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Dinas Pendidikan.

A. REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2018

Tujuan Dinas Pendidikan menurut perubahan Renstra Tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Sasaran Dinas Pendidikan yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dengan strategi Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan Mutu Pendidikan.

Untuk mencapai mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan menjalankan delapan program pembangunan pendidikan seperti tercantum dalam dokumen rencana strategis. Pengelompokkan program pembangunan pendidikan disusun berdasarkan issu pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik program urusan maupun non urusan. Delapan program Dinas Pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah : 1) Program Pendidikan Menengah ; 2) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; 3)Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; 8) Program Bantuan Operasional Sekolah.

Tabel 3.1 halaman berikut adalah rekapitulasi capaian kinerja tahun 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai Target di dalam Indikator Kinerja

Perubahan Renstra dan kewenangan Pengelolaan Manajemen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).

Tabel 3.1

Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018 sesuai Perubahan Renstra Tahun 2015 - 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK SMA/SMK/SMPLB/MA/ Paket C	93,41%	82,54%	88,36%
	APM SMA/SMK/SMPLB/MA/ Paket C	70,43%	63,81%	90,60%
	Persentase Sekolah yang terakreditasi minimal B			
	- SMA	95,00%	82,23%	86,56%
	- SMK	45,40%	54,43%	119,89%
Persentase Capaian Kinerja Dinas Pendidikan			**385,41%**	
Rata-Rata Persentase Capaian			**96,35%**	

Pada tabel 3.1 tersebut menunjukkan bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan pada Tahun 2018 dengan 8 (delapan) program menunjukkan capaian 96,36%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang tingkat belum mencapai 100 % pada Tahun 2018 yaitu APK SMA/SMK/SMPLB/MA/ Paket C capaiannya hanya mencapai 88,36% dan APM SMA/SMK/SMPLB/MA/ Paket C yang capaiannya sudah diatas 90% yaitu sebesar 90,60% sedangkan Persentase Sekolah yang terakreditasi minimal B SMA capaiannya hanya 86,56% serta Persentase Sekolah yang terakreditasi minimal B SMK 119,89% , masih

diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja Indikator secara langsung.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar OPD di lingkungan Dinas Pendidikan, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Persentase Sekolah yang terakreditasi minimal B, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN

Dalam meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari beribagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM periode sebelumnya. Untuk itu, sampai dengan tahun 2018 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Riau senantiasa perlu terus ditingkatkan, agar dapat selaras dengan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pendidikan diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja yaitu:

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Paket C.
2) Angka Partisipasi Murni (APM) MA/SMK/MA/SMLB/Paket C;
3) Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi minimal B

Tingkat ketercapaian dari indikator tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat**

   Indikator APK SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 } - \text{ 18 Tahun}} X\ 100\%$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja APK Sekolah Menengah Sederajat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	6	7	8	6	7	8
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK SMA / SMK/MA/Paket C	78.30%	81.39%	103.95%	93,41%	82,54%	88,36%

Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan menengah merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapaiannya tujuan tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "APK Provinsi SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C".

Kinerja tahun 2017 sebesar 103,69%, jika dibanding dengan capaian tahun 2018 yaitu 88,36% terjadi penurunan sebesar 15,59%, begitu juga dengan realisasi APK Sekolah Menengah sederajat mengalami kenaikan dari 81.39% di tahun 2017 meningkat menjadi 82,54% di tahun 2018.

Sesuai dengan target perubahan rencana strategis 2015-2019, pada tahun 2018 atau tahun ketiga periode perubahan rencana strategis 2017-2019 APK SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C ditargetkan mencapai 93,41%. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 berhasil mencapai 82,54%. Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya akses layanan pendidikan menengah pada tahun 2018 berhasil dicapai.

APK Nasional Sekolah Menengah sederajat Tahun 2018 sebesar 88,55%. Jika dibandingkan dengan capaian APK Nasional tersebut, maka dengan realisasi sebagaimana data tersebut dibawah sebesar 6,01%, APK Sekolah Menegah Provinsi Riau masih berada dibawah angka rata-rata Nasional.

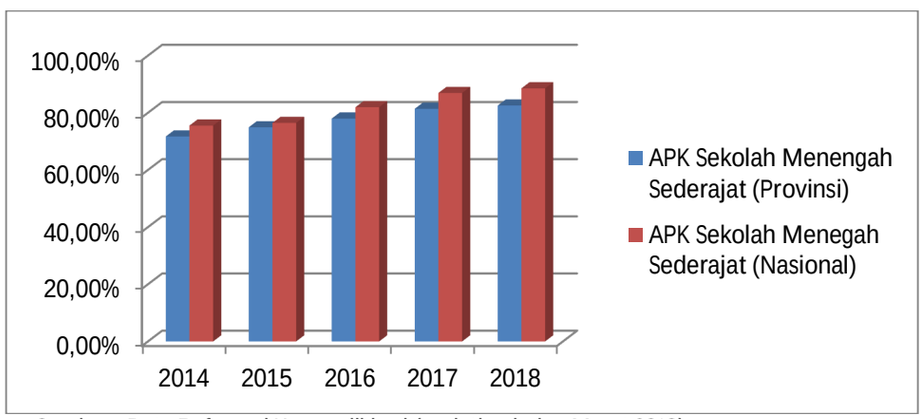
Berikut tren pencapaian angka partisipasi kasar APK SMA/SMK/SMLB/Paket C Provinsi Riau dan nasional lima tahun terakhir terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat
Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
APK Sekolah Menengah Sederajat (Provinsi)	71,69%	74,92%	77,97%	81,39%	82,54%
APK Sekolah Menegah Sederajat (Nasional)	75,53%	76,45%	81,95%	86,94%	88,55%

Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating bulan Maret 2018)

Grafik 3.1
Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat
Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018



Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating bulan Maret 2018)

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terlihat bahwa baik APK provinsi maupun APK nasional mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi APK SM Sederajat Provinsi masih dibawah rata-rata Nasional. Di tahun 2014 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,84% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2015 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 1,53% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2016 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,96% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2017 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 5,55% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2018 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 6,01% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

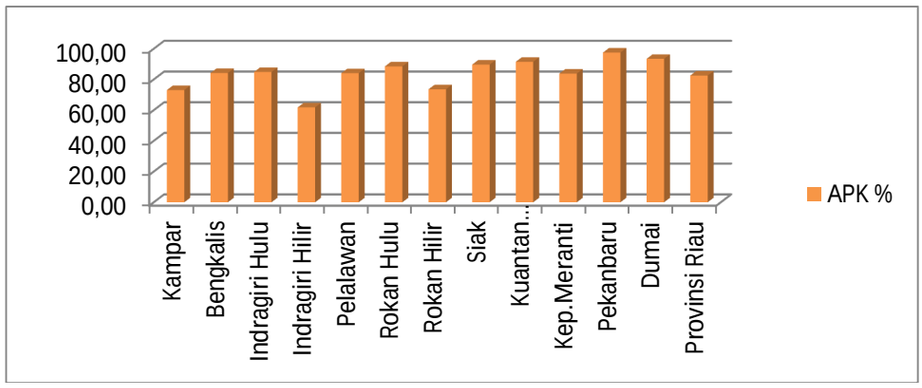
Tabel dan grafik berikut menggambarkan kondisi capaian APK Sekolah Menegah Sederajat di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2018.

Tabel 3.4
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota
se Provinsi Riau Tahun 2018

NO	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah Siswa	APK %
1	2	3	4	6
1	Kampar	44,895	32,150	71,61
2	Bengkalis	35,879	29,594	82,48
3	Indragiri Hulu	21,722	17,974	82,75
4	Indragiri Hilir	41,380	25,918	62,63
5	Pelalawan	18,151	14,666	80,80
6	Rokan Hulu	25,560	21,917	85,75
7	Rokan Hilir	41,500	30,721	74,03
8	Siak	24,547	21,955	89,44
9	Kuantan Singingi	15,847	14,371	90,69
10	Kep.Meranti	10,586	9,000	85,02
11	Pekanbaru	58,286	55,457	95,15
12	Dumai	14,747	13,657	92,61
Provinsi Riau		**356,100**	**291,380**	**81,83**

Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Grafik 3.2
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018



Tabel dan grafik 3.2 tersebut menunjukkan ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Pelalawan (80,80%), Kabupaten Rokan Hilir (74,03%), Kabupaten Kampar (71,61%), dan Kabupaten Indragiri Hilir (62,63%), dengan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah Kabupaten Indragiri Hilir mendapat prioritas utama.

2. **Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Sederajat.**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/MA/SMK/Paket C Usia 16 – 18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \text{ X } 100\%$$

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan program pembangunan sekolah terpadu, dengan kegiatan antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru.

Untuk mengukur ketercapaian indikator ini diperlukan data Jumlah siswa Sekolah Menengah Sederajat Usia 16-18 Tahun dan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun. Indikator APK SM Sederajat diperoleh dengan cara membagi Jumlah siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun dikalikan 100%.

Berdasarkan data dari Data Referensi Pendidikan Kemendikbud RI, Tahun 2018 siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun di Provinsi Riau berjumlah 228,384 dan jumlah penduduk berusia 16–18 Tahun berjumlah 357.900 jiwa, dengan demikian APM SM sederajat Provinsi Riau adalah 63,81%. Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota
se Provinsi Riau Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	6	7	8	6	7	8
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APM SM Sederajat	62,92%	60,22%	95,71%	70,43%	63,81%	90,60%

Data Capaian kinerja tersebut diatas menggambarkan bahwa realisasi indikator APM SM Sederajat mengalami kenaikan sebesar 3,59%, dari 60,22% di Tahun 2017 menjadi 63,81% di Tahun 2018, sedangkan capaian kinerja Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,11%. Target APM SM Sederajat yang ditetapkan sebesar 70,43% belum tercapai, masih terdapat selisih yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,62%. Belum tercapainya target APM yang ditetapkan, bisa terjadi karena kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan capaian angka partisipasi murni tidak terlaksana dan target yang ditetapkan tidak didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya.

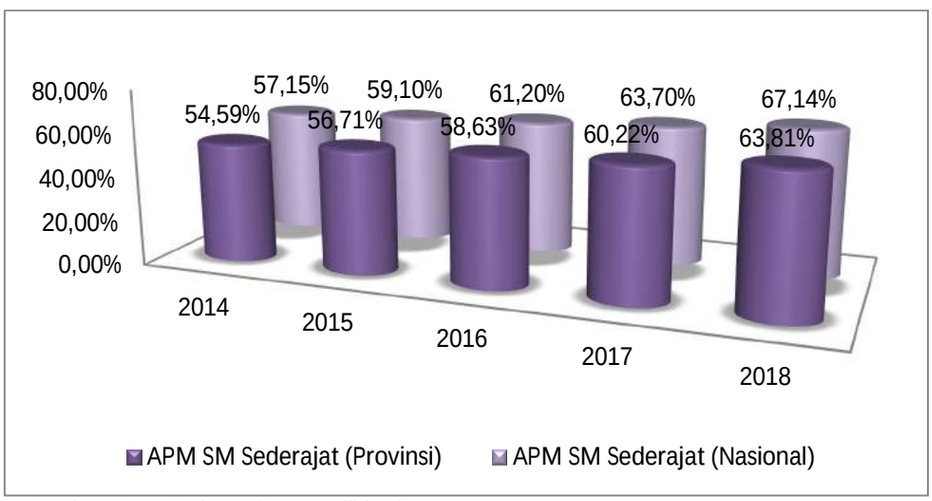
Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau dan nasional lima tahun terakhir:

Tabel 3.6
Perbandingan Perkembangan APM Sekolah Menegah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
APM SM Sederajat (Provinsi)	54,59%	56,71%	58,63%	60,22%	63,81%
APM SM Sederajat (Nasional)	57,15%	59,10%	61,20%	63,70%	67,14%

Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating data bulan Maret 2019)

Grafik 3.3
Perbandingan Perkembangan APM SM Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Tabel dan grafik tersebut diatas menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

a) APM provinsi maupun APM nasional mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi APM SM Sederajat Provinsi masih dibawah rata-rata Nasional.
b) Tahun 2014 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 2,56% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2015 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi

Riau lebih rendah 2,39% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

c) Tahun 2016 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 2,39% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

d) Tahun 2017 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,48% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

e) Tahun 2018 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,33% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

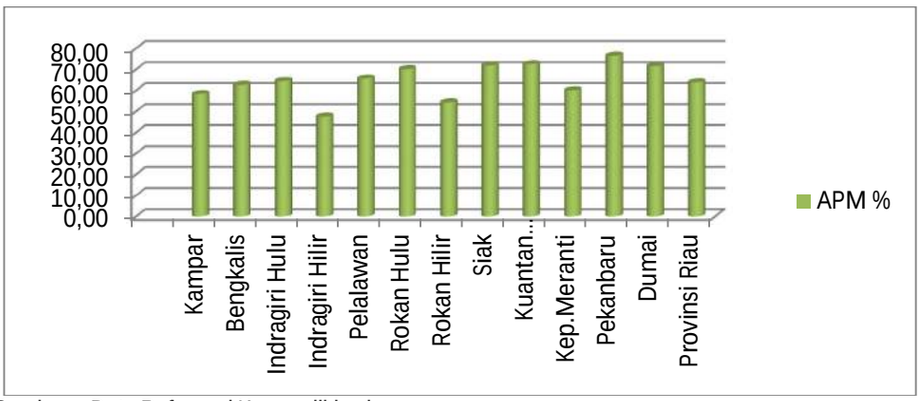
Untuk mengetahui realisasi atau capaian APM SM Sederajat di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.7
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah Siswa	APM %
1	Kampar	45,506	26,516	58,27
2	Bengkalis	36,369	22,796	62,68
3	Indragiri Hulu	22,018	14,183	64,42
4	Indragiri Hilir	41,934	19,934	47,54
5	Pelalawan	18,397	12,082	65,67
6	Rokan Hulu	25,907	18,16	70,10
7	Rokan Hilir	42,068	22,852	54,32
8	Siak	24,880	17,87	71,82
9	Kuantan Singingi	16,062	11,643	72,49
10	Kep.Meranti	10,730	6,446	60,07
11	Pekanbaru	59,080	45,204	76,51
12	Dumai	14,949	10,698	71,56
Provinsi Riau		**357,900**	**228,384**	**63,81**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.4
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota
se Provinsi Riau Tahun 2018



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APM SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata APM Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 47,54% (paling terendah), Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian APM sebesar 54,32%, Kabupaten Kampar dengan capaian APM sebesar 58,27% dan Kabupaten Kep. Meranti sebesar dengan capaian APM sebesar 60,07%. Realisasi capaian APM SM Sederajat tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 76,51%.

Untuk pemerataan akses pendidikan dan pelaksanaa pendidikan menengah universal di Provinsi Riau, yang sudah menjadi kewenangan dan urusan Pemerintah provinsi, maka intervensi pembangunan ruang kelas, unit sekolah baru dan pendidikan layanan khusus hendaknya diprioritaskan ke kabupaten yang masih rendah APMnya.

Pada tahun 2018, **perluasan akses pendidikan menengah** juga terlihat dari dari Dana Alokasi Khusus pendidikan menengah yaitu kegiatan penyelenggaraan SMA dan SMK pada11 kabupaten/kota, melalui :

a. Pembangunan 38 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA;
b. Rehabilitasi 128 Ruang Kelas SMA ;
c. Pengadaan Meubiler 38 ruang kelas SMA;
d. Pembangunan 42 Ruang Praktek Sekolah (RPS) SMK.

Upaya dalam meningkatkan akses pendidikan menengah melalui program pendidikan menengah pada beberapa kegiatan

Revitalisasi SMA 3 sekolah, Revitalisasi SMK 4 sekolah, Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK 3 sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 4 sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA 12 sekolah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator APK dan APM Sekolah Menengah sederajat, antara lain :

a. Tingkat ekonomi masyarakat yang belum merata menyebabkan belum semua keluarga mampu mendukung peningkatan APK pendidikan menengah. Hal ini khususnya sangat berkaitan dengan biaya personal yang harus disediakan oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya, dan pada sisi lain pemerintah belum mampu mencover keseluruhan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.
b. Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai ke-ekonomian anak yang diharapkan telah mampu mendukung ekonomi keluarga.
c. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

a. Meningkatkan Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan optimalisasi sekolah ramah social (sekolah gratis dan diasramakan bagi lulusan SMP sederajat kurang mampu dan berprestasi).
b. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik, termasuk kebijakan satu kecamatan satu SMA/SMK.

c. Peningkatan pemahaman bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan masa depan anak dengan tidak mengesampingkan faktor ke ekonomian dalam membantu ekonomi keluarga melalui pendekatan yang terintegrasi dengan pola kegiatan yang bernilai ekonomi.
d. Melalui pelaksanaan sekolah marginal dan sekolah jarak jauh.

3. **Sekolah SMA dan SMK yang terakreditasi minimal B**

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikann Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: I) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/satuan pendidikan; 2) Kewenangan akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang di beri kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi; 3) Akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Sesuai dengan target Perubahan Renstra, capaian kinerja persentase SMA/SMK terakreditasi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

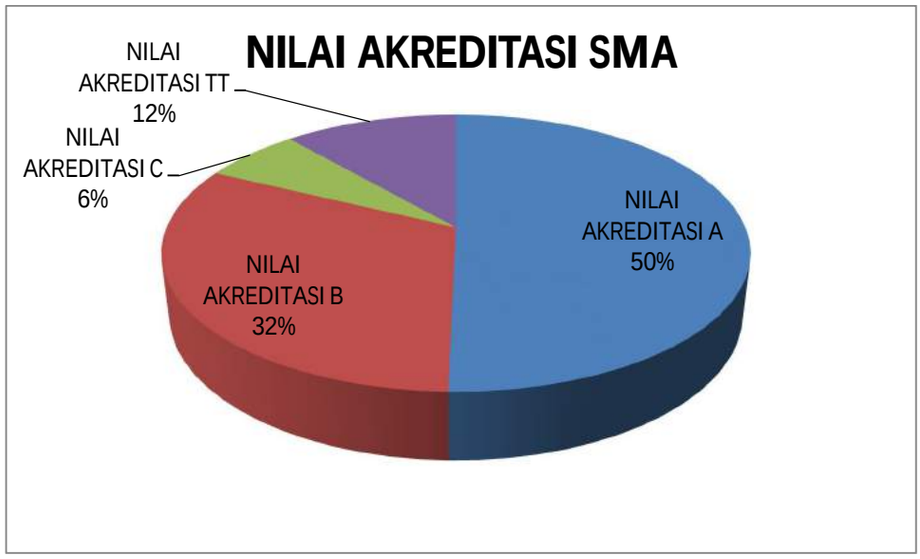
Tabel 3.8
Tabel Capaian Persentase SMA/SMK Terakreditasi Minimal B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	6	7	8	6	7	8
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Persentase SMA Terakreditasi Minimal B	64,74%	72,70%	112,30%	95,00%	82,23%	86,56%
	Persentase SMK Terakreditasi Minimal B	64,74%	29,00%	44,79%	45,40%	54,43%	119,89%

Sesuai dengan Target Perjanjian, pada tahun 2018 Dinas Pendidikan mentargetkan persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 95,00%, terealisasi sebesar 82,23%, dengan capaian kinerja sebesar 86,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi persentase tahun 2017 maka persentase SMA terakreditasi mengalami Penurunan sebesar 25,74%. Sedangkan Target Persentase SMK terakreditasi minimal B sebesar 44,79%, terealisasi sebesar 54,43%, dengan capaian kinerja sebesar 119,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi persentase tahun 2017 maka persentase SMK terakeditasi mengalami kenaikan sebesar 75,10%.

Data dalam grafik dibawah ini menggambarkan bahwa sebagian besar 12% SMA di Provinsi Riau belum terakreditasi dari jumlah sekolah SMA yang diakreditasi oleh BAN yaitu 439 sekolah dan juga karena sekolah yang akreditasinya masa berlakunya selama 5 tahun telah habis sehingga di himbau kepada Sekolah untuk memperbarui penilaian akreditasinya. Sekolah SMA terakreditasi A sebesar 49,89%, berakreditasi nilai B sebesar 31,60%, dan berakreditasi C sebesar 6,32%.

Grafik 3.5
Persentase Nilai Akreditasi SMA Provinsi Riau
Tahun 2018



Tabel 3.9
Persentase Nilai Akreditasi SMA se Provinsi Riau
Tahun 2018

JENJANG SEKOLAH	NILAI AKREDITASI								Jumlah Sekolah yang diakreditasi
	A	A	B	B	C	C	TT	TT	
SMA	49,89%	221	31,60%	140	6,32%	28	11,29%	50	439

Sumber: Data Referensi Pendidikan (BAN-SM)

Tabel 3.10
Perkembangan Persentase Nilai Akreditasi SMA se Provinsi Riau
Tahun 2015-2018

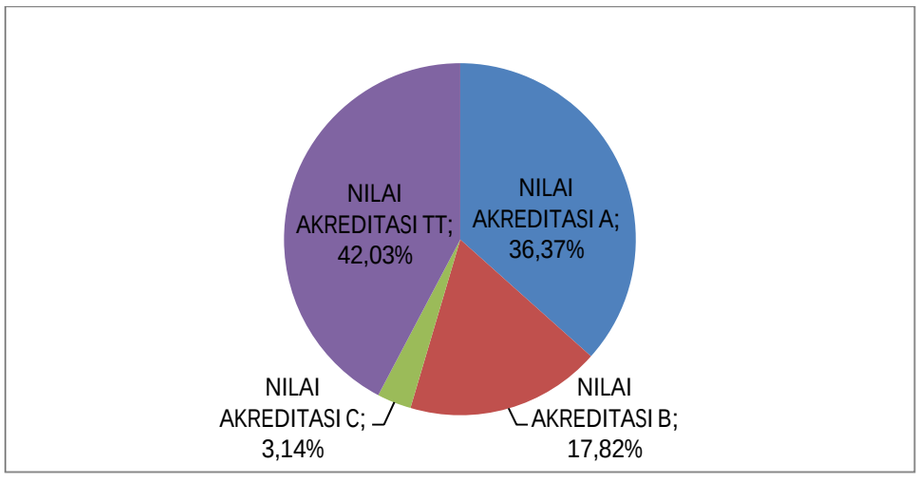
NO	TAHUN	JENJANG SEKOLAH	NILAI AKREDITASI				Nilai Akreditasi Minimal B (A+B)
			A	B	C	TT	
1	2015	SMA	37,2%	29,7%	12,4%	20,7%	66,90%
2	2016	SMA	28,3%	26,6%	10,2%	34,9%	54,90%
3	2017	SMA	45,50%	27,20%	5,50%	21,7%	72,70%
4	2018	SMA	49,89%	31,60%	6,32%	11,29%	81,49%

Sumber: Data Referensi Pendidikan (BAN-SM) (Updating data bulan Maret 2019)

Tabel 3.10 diatas menggambarkan bahwa persentase SMA terakreditasi minimal B dari tahun 2014 sampai tahun 2018 berfluktuasi tiap tahunnya. Pada Tahun 2015 Persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 66,90% sedangkan di tahun 2016 sebesar 54,90% mengalami penurunan yaitu sebesar 12%. Pada Tahun 2017 Persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 72,70% jika

dibandingkan dari tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 17,80%. Pada tahun 2018 Persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 81,49% jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,79%.

Grafik 3.6
Persentase Nilai Akreditasi SMK Provinsi Riau (Program Keahlian)
Tahun 2018



Tabel 3.11
Persentase Nilai Akreditasi SMK se Provinsi Riau
Tahun 2018

JENJANG SEKOLAH	NILAI AKREDITASI								Jumlah Program keahlian yang diakreditasi
	A	A	B	B	C	C	TT	TT	
SMK	36,37%	347	17,82%	170	3,14%	30	42,03%	401	948

Sumber: Data Referensi Pendidikan (BAN-SM)

Data tabel 3.11 ini menggambarkan bahwa sebagian besar yaitu 42,03% SMK (menurut program keahlian) di Provinsi Riau belum terakreditasi dari jumlah sekolah SMK berdasarkan program keahlian yang diakreditasi oleh BAN yaitu 948 dan juga karena program keahlian SMK yang akreditasinya masa berlakunya selama 5 tahun telah habis sehingga di himbau kepada Sekolah untuk memperbarui penilaian akreditasinya. Sekolah SMK terakreditasi A (program keahlian) sebesar 36,37%, berakreditasi nilai B sebesar 17,82%, dan berakreditasi C sebesar 3,14%.

Tabel 3.12
Perkembangan Persentase Nilai Akreditasi SMK (Program Keahlian)
se Provinsi Riau Tahun 2015 - 2018

NO	TAHUN	JENJANG SEKOLAH	NILAI AKREDITASI				Nilai Akreditasi Minimal B (A+B)
			A	B	C	TT	
1	2015	SMK	25,0%	16,9%	6,9%	51,2%	41,90%
2	2016	SMK	60,8%	34,0%	5,3%	0	94,80%
3	2017	SMK	18,80%	10,20%	1,80%	69,2%	29,00%
4	2018	SMK	36,37%	17,82%	3,14%	42,03%	54,19%

Sumber: Data Referensi Pendidikan (BAN-SM) (Updating data bulan Maret 2019)

Tabel 3.12 diatas menggambarkan bahwa persentase SMK terakreditasi minimal B (program keahlian) dari tahun 2014 sampai tahun 2018 berfluktuasi tiap tahunnya. Pada Tahun 2015 Persentase SMK terakreditasi minimal B sebesar 41,90% sedangkan di tahun 2016 sebesar 94,80% mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 52,90%. Pada Tahun 2017 Persentase SMK terakreditasi minimal B sebesar 29,00% jika dibandingkan dari tahun 2017 mengalami penurunan kembali yang sangat signifikan sebesar 65,80%. Pada tahun 2018 Persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 54,19% jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 25,19%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Sekolah yang terakreditasi minimal B adalah sebagai berikut.

1) Banyak sekolah/madrasah di daerah terpencil yang belum siap untuk diakreditasi.
2) Partisipasi pengelola program/lembaga pendidikan masih rendah karena belum melihat kepentingan (*urgency*) akreditasi sekolah dan belum jelas *civil effect*-nya.
3) Sinergi antara BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan belum optimal.
4) Keterlambatan penyelesaian administrasi akreditasi dari satuan pendidikan.
5) Masa berlakunya Akreditasi yang sudah habis, tetapi belum diakreditasi kembali oleh BAN-SM

6) Kompetensi staf pada tingkat satuan pendidikan dalam membuat evaluasi diri sekolah (EDS) masih kurang
7) Kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan masih kurang Melihat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan di masa datang adalah sebagai berikut:
    1) Mengusahakan keberlangsungan dukungan dana dari APBD Provinsi dan pihak terkait lainnya untuk membantu sekolah memenuhi 8 standar nasional pendidikan.
    2) Menyusun jadwal dan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait Program/kegiatan akreditasi
    3) Meningkatkan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh unit terkait di propinsi dan kabupaten/kota mengenai pentingnya penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
    4) Meningkatkan koordinasi untuk bersinergi antara BAN S/M, BAP dengan Dinas Pendidikan provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 SNP, terutama dalam meningkatkan:
        (1) Kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan
        (2) Kemampuan sekolah dalam pengorganisasian program sekolah
        (3) Kemampuan Tim Pengembang Sekolah
        (4) Kemampuan Sekolah dalam Pengembangan nuansa akademik
        (5) Kemampuan Sekolah dalam Pencapaian Prestasi Akademik
        (6) Kemampuan Sekolah dalam Pencapaian Prestasi Non Akademik

(7) Kemampuan Sekolah dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Karakter

(8) Kemampuan Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Sekolah.

C. CAPAIAN KINERJA ESELON III SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Capaian kinerja eselon III Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2018 Sekretaris
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
1	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), Jumlah penghasilan yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	496.702.400	389.112.200	78,34%
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kegiatan	11 Kegiatan	91,67%	10.662.043.900	7.869.134.617	73,81%

3	Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Sarana Pendidikan	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Jumlah Sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%	2.008.538.100	1.006.799.850	50,13%
4	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00%	4.544.203.730	2.023.087.100,00	44,52%
5	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	16.985.574.000	14.820.114.250	87,25%
Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan					**98,33%**	**34.697.062.130**	**26.108.248.017**	**66,81%**

Tabel 3.13 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja dari 5 sasaran capaian target realisasinya tercapai 98,33% dan keuangannya Rp. 26.108.248.017,- dari target Rp. 34.697.062.130,- capaian anggarannya 66,81%. Dari target kinerja hanya 1 kegiatan yg tidak terlaksana di sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tidak tercapainya target keuangan disebabkan faktor efisiensi dan adanya rencana rasionalisasi anggaran di tahun 2018 dikarenakan defisit anggaran atau keadaan keuangan daerah.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2018 Kepala Bidang SMA
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
1	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%	10.899.081.400	8.017.664.800	73,56%

2	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	23 Kegiatan	15 Kegiatan	65,22%	654.203.299.100	582.167.205.530	88,99%
Capaian Kinerja Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan					**82,61%**	**665.102.380.500**	**590.184.870.330**	**81,28%**

Tabel 3.14 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja dari 2 sasaran capaian target realisasinya tercapai 82,61% dan keuangannya Rp.590.184.870.330,- dari target Rp. 665.102.380.500,- capaian anggarannya 81,28%. Dari target kinerja ada 8 kegiatan yg tidak terlaksana di sasaran Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi, salah satunya Kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru tidak terlaksana 100 persen hanya pencairan perencanaannya saja. Tidak tercapainya target keuangan karena faktor rencana rasionalisasi anggaran di tahun 2018 dikarenakan defisit anggaran atau keadaan keuangan daerah. Kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru tidak terlaksana 100 persen hanya pencairan.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2018 Kepala Bidang SMK
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
1	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%	6.799.832.400	5.711.620.550	84,00%
2	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	12 Kegiatan	10 Kegiatan	83,33%	133.508.448.566,67	76.818.289.383	57,54%
Capaian Kinerja Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan					**91,67%**	**140.308.280.967**	**82.529.909.933**	**70,77%**

Tabel 3.15 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja dari 2 sasaran capaian target realisasinya tercapai 91,67% dan keuangannya Rp.82.529.909.933,- dari target Rp. 140.308.280.967,- capaian anggarannya 70,77%. Dari target kinerja ada 2 kegiatan yg tidak terlaksana di sasaran Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi. Tidak tercapainya target keuangan karena faktor rencana rasionalisasi

anggaran di tahun 2018 dikarenakan defisit anggaran atau keadaan keuangan daerah.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2018 Kepala Bidang PKLK
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
1	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	2 egiatan	2 Kegiatan	100,00%	5.601.229.600	5.493.930.200	98,08%
2	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	3 Kegiatan	3 kegiatan	100,00%	16.181.575.000	14.660.340.854	90,60%
3	Meningkatnya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Terlaksananya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	9 Kegiatan	7 Kegiatan	77,78%	8.115.534.030	5.154.596.015	63,52%
Capaian Kinerja Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan					**92,59%**	**29.898.338.630**	**25.308.867.069**	**84,07%**

Tabel 3.16 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja dari 3 sasaran capaian target realisasinya tercapai 92,59% dan keuangannya Rp.25.308.867.069,- dari target Rp. 29.898.338.630,- capaian anggarannya 84,04%. Dari target kinerja ada 3 kegiatan yg

tidak terlaksana di sasaran Meningkatnya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Tidak tercapainya target keuangan karena faktor rencana rasionalisasi anggaran di tahun 2018 dikarenakan defisit anggaran atau keadaan keuangan daerah.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan dalam DPA SKPD Tahun 2018 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja dinas tahun 2018 adalah sebesar Rp. 920.569.586.826,67,-. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai delapan program yang ada Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaanya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan/pergeseran anggaran dari program BOS Nasional menjadi sebesar Rp.941.314.146.827,67,-.

Berikut pengalokasian anggaran tahun 2018 pada delapan program Dinas Pendidikan serta capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan sesuai dengan laporan pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel 3. 17
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan
Tahun 2018

No	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1	2	3	4
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.135.376.949.876**	**54,67%**
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**941.314.146.827,67**	**45,33%**
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.662.043.900	1,13%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.008.538.100	0,21%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	496.702.400	0,05%
4	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	543.636.247.877,67	57,75%
5	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	71.663.802.630	7,61%
6	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	43.890.299.230	4,66%
7	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	268.956.512.690	28,57%
	TOTAL ANGGARAN	2.076.691.096.703,67	**100,00%**

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Desember 2018

Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp 941.493.565.992,- yang tersebar ke tujuh program di bidang seperti terlihat dalam tabel dan grafik di atas digunakan untuk membiayai empat program non urusan dan tiga program urusan wajib pembangunan pendidikan. Delapan program antara lain: 1) Pelayanan Administrasi perkantoran; 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 4) Pendidikan Menengah; 5) Manajemen Pelayanan Pendidikan; 6) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; 7) Program Bantuan Operasional Sekolah

Dari pagu anggaran Belanja tidak langsung Rp.1.135.376.161.331,- dibelanjakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.005.957.156.773,- atau terserap sebesar 85,16%, sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.941.314.827.67,- dan berhasil terserap sebesar Rp.762.526.983.915,- sehingga persentase daya serap anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan sampai Desember 2018 adalah sebesar 75,43% dengan realisasi fisik sebesar 96,04%. Daya serap anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah RP.2.076.690.308.158,67,- atau sebesar 85,16%.

Berikut tabel daya serap anggaran untuk delapan program yang dilaksanakan oleh Bidang dilingkungan Dinas pendidikan Provinsi Riau selama tahun 2018.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Pendidikan Tahun 2018

No	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1	2	3	4	5
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1,135,376,161,331**	**1.005,957,156,773**	**88.60%**
B	**BELANJA LANGSUNG**	**941,493,565,992,67**	**762,526,897,453**	**81.01%**
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10,662,043,900	7,869,134,167	50.30%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,008,538,100	1,006,799,850	87.20%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	496,702,400	389,112,200	78.34%

No	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1	2	3	4	5
4	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	543,636,247,877,67	400,376,135,996	73.65%
5	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	71,663,802,630	48,190,093,505	67.24%
6	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	43,890,299,230	37,519,038,717	85.86%
7	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	150,000,000	143,250,000	85.50%
	TOTAL ANGGARAN	**2,076,690,308,157,67**	**1,786,484,140,687,50**	**85.16%**

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Desember 2018

Berikut realisasi kinerja keuangan pada tujuh program yang terdiri dari 3 program non urusan dan 5 program urusan wajib di lingkungan Dinas Pendidikan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.10.662.043.900,- telah terealisasi sebesar Rp.7.869.134.617,- dengan persentase sebesar 73,81%;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.2.008.538.100,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.006.799.850,- dengan persentase sebesar 50,13%;
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.496,702,400,- telah terealisasi sebesar Rp.389,112,200,- dengan persentase sebesar 78,34%
4) Program Pendidikan Menengah Rp.543.636.247.877,67,- telah terealisasi sebesar Rp.400.376.135.996,- dengan persentase sebesar 73,65%;
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.71,663802,630,-telah terealisasi sebesar Rp.48,190,093,505,- dengan persentase sebesar 67,24%;
6) Program Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.43,890,299,230,- telah terealisasi sebesar Rp.37,519,038,717,- dengan persentase sebesar 85,48%;

7) Program Bantuan Operasional Sekolah dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.268.956.512,690,- telah terealisir sebesar RP.267.176.669,030,- dengan persentase sebesar 99,34%.

Dari data tersebut diatas, realisasi anggaran tertinggi adalah sebesar 99,34% dari program Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan program dengan realisasi anggaran terendah adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (50,13%). Selain itu ada enam program yang realisasi keuangannya berada diatas realisasi keseluruhan (85,16%), terdiri dari tiga program non urusan dan tiga program urusan yaitu: 1) Program Bantuan Operasional Sekolah, dengan realisasi 99,34%; 2) Program Pendidikan Menengah dengan realisasi 89,69%; 3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan realisasi sebesar 89,40%; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan realisasi sebesar 87,20%; 5) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan realisasi sebesar 85,86%; dan 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (84,46%).

Tabel dan grafik berikut adalah realiasi daya serap APBD kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 – 2018.

Tabel 3.19
Realisasi APBD Belanja Langsung Tahun 2014 – 2018

No	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2014	430,424,657,800	245,145,305,337	56.95%
2	2015	494,395,196,702	300,822,777,102	60.85%
3	2016	555,003,354,182	448,147,468,665	80.75%
4	2017	842,493,565,992	751,158,897,453	89.16%
5	2018	941,314,146,827.67	762,526,983,915	81.01%

Sumber : Lakip Dinas Pendidikan 2017 dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 2018

Dari tabel dan grafik tersebut diatas jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian daya serap anggaran, maka realisasi dan capaian daya serap anggaran tahun 2018 adalah merupakan capaian ketiga tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Tabel 3.20
Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Dana Dekonsentrasi
Dinas Pendidikan Provinsi Riau Semester II Tahun 2018

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		**6.081.871.000**	**5.503.715.050**	**90,49**
1	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1.936.194.000	1.893.773.850	97,81
2	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	2.394.835.000	2.200.426.900	91,88
3	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.750.842.000	1.409.514.300	80,50
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		**300.781.000**	**295.614.700**	**98,28**
PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		**1.940.688.000**	**1.847.764.400**	**95,21**

Tabel 3.19 tersebut diatas menggambarkan realisasi kinerja keuangan dana dekonsentrasi untuk 3 program yaitu Program Pendidikan Dasar dan Menengah, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2018 di lingkungan Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dasar dan Menengah dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.081.871.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.503.715.050,- dengan capaian kinerja sebesar 90,49%.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 300.781.000,- terealisasi sebesar Rp. 295.614.700,- dengan capaian kinerja sebesar 98,28%.
3. Program Guru dan Tenaga Kependidikan dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.081.871.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.847.764.400,- dengan capaian kinerja sebesar 95,21%.

Beberapa hambatan dan kendala yang perlu diantisapasi agar daya serap APBD dan APBN sesuai atau mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (Penja) antara lain adalah:

1) Perencanaan dari program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif dan integratif

2) Staf di Dinas Pendidikan belum memiliki kapasitas dan kompetensi manajerial Riau terkait dengan perencanaan, penganggaran dan keuangan.
3) Kegiatan fisik yang memerlukan proses lelang, waktu pelaksanaan untuk mengikuti proses lelang tidak mencukupi.
4) Keadaan keuangan daerah yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran.
5) Efisiensi anggaran dari dana proses lelang dan penunjukan langsung

Untuk meminimalkan kendala dan hambatan capaian kinerja meningkatnya daya serap APBD sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal dibawah ini dirasa perlu untuk dilakukan:

1) Membuat recana program dan kegiatan yang lebih realistis, komperhensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya.
2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi manajerial staf Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait dengan perencanaan, penganggaran dan keuangan.
3) Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang.

BAB IV

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan *(stakeholders)* di dunia pendidikan. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2018 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari tujuh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian IKU Dinas Pendidikan tahun 2018 adalah sebesar 96,35**%.** Dari sebanyak 4 IKU yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2018 Dinas Pendidikan. Dengan rincian sebanyak 1 IKU capaian kinerjanya sangat tinggi, 3 IKU capaian kinerjanya tinggi.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian IKU selama tahun 2018.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Tingkat Pencapaian IKU Selama Tahun 2018

Urutan	Rentang Capaian	Kategori capaian	Jumlah IKU	%
I	91% < 100%	Sangat Tinggi	1	119,89
II	76% < 90%	Tinggi	3	88,51
III	66% < 75%	Sedang	-	-
IV	51% < 65%	Rendah	-	-
V	< 50%	sangat Rendah	-	-

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2018 untuk belanja tidak langsung dan tidak langsung adalah sebesar 85,16**%.** Dari sebanyak 7 program Dinas Pendidikan. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar 88,52%, masuk dalam katagori tinggi dan belanja langsung terealisasi sebesar 81,01% dengan kategori tinggi. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja keuangannya ada dalam kategori tinggi (85,16%). Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2018 atau tahun ketiga dari pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2015-2019,

merupakan dasar berpijak bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk dua tahun berikutnya sesuai perubahan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan akses dari jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya penyediaan sarana dan prasana di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil, penyebaran guru yang belum merata.

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan berdaya saing dapat terealisasi. sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN REVISI RENSTRA TAHUN 2015-2019
2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN REVISI RENSTRA TAHUN 2015-2019
3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
5. DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN TAHUN 2017
6. DAFTAR PRESTASI DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2017
7. DAYA SERAP APBD DESEMBER TAHUN 2017

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUDYANTO, SH, M.Si**
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**
Jabatan : GUBERNUR RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Pihak Pertama

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkat Mutu dan Akses Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) :	
	- SMA/ SMK/ MA/SMLB/Paket C	93,41%
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) :	
	- SMA/ SMK/ MA/SMLB/Paket C	70,43%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp	549.213.600.566,67	APBD
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	71.663.802.630,00	APBD
3	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Rp	43.890.299.230,00	APBD
4	Program Bantuan Operasional Sekolah	Rp	242.634.600.000,00	APBD
5	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp	5.952.511.000,00	APBN
6	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp	1.940.688.000,00	APBN
7	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	300.781.000,00	APBN

Pekanbaru,

GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

RUDYANTO, SH
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AHYU SUHENDRA, SE**
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDYANTO, SH, M.Si**
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

Pihak Pertama

AHYU SUHENDRA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19711209 200012 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), Jumlah penghasilan yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan	1 Kegiatan
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kegiatan
4	Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Sarana Pendidikan	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Jumlah Sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal	3 Kegiatan
5	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5 Kegiatan
6	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah	1 Kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**496.702.400,00**	
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	146.702.400,00	
2	Pembinaan Jasmani dan Rohani	350.000.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**10.662.043.900,00**	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	978.471.000,00	
4	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.390.000.000,00	
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	305.000.000,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2.152.200.000,00	
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.036.000.000,00	
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	250.000.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	900.000.000,00	
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	1.120.000.000,00	
12	Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	1.730.372.900,00	
13	Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	400.000.000,00	
14	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT.Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	300.000.000,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**2.008.538.100,00**	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.108.538.100,00	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	400.000.000,00	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000,00	

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**4.544.203.730,00**	
18	Pengadaan Kelender Pendidikan	295.367.000,00	
19	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	489.988.000,00	
20	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	250.000.000,00	
21	Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan	826.167.230,00	
22	Pengelolaan Data Pendidikan	1.086.777.100,00	
23	Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruktur Berbasis Mading Digital Interaktif	162.000.000,00	
24	Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	1.433.904.400,00	
	Program Pendidikan Menengah	**16.985.574.000,00**	
25	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	16.985.574.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680312 199403 1 004

Pihak Pertama

AHYU SUHENDRA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19711209 200012 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. AKBAR PRABOWO, M.Si**
Jabatan : KEPALA SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AHYU SUHENDRA, SE**
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
AHYU SUHENDRA, SE	**Drs. AKBAR PRABOWO, M.Si**
Penata Tingkat I	**Penata Tingkat I**
NIP. 19711209 200012 1 006	**NIP. 19790919 200012 1 003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran	Indikator	Target
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan
Manajemen Pelayanan Pendidikan			
2	Terlaksananya Pengadaan Kelender Pendidikan	Tersedianya Pengadaan Kelender Pendidikan	17.047 eks
3	Pengelolaan Data Pendidikan	Tersedianya Data Pokok Pendidikan	200 Buku Profil
4	Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastuktur Berbasis Mading Digital Interaktif	Tersedianya Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastuktur Berbasis Mading Digital Interaktif	3 Sekolah
5	Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	Terlaksananya Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	1 Dokumen
6	Terlaksananya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	12 Kab/ Kota
Program Pendidikan Menengah			
7	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	Terlaksananya Sistem Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	10 Sekolah

	Program/Kegiatan	Jumlah Dana	Keterangan
		21.094.789.730,00	
1	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	305.000.000,00	
2	Terlaksananya Pengadaan Kelender Pendidikan	295.367.000,00	
3	Pengelolaan Data Pendidikan	1.086.777.100,00	
4	Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastuktur Berbasis Mading Digital Interaktif	162.000.000,00	
5	Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	1.433.904.400,00	
6	Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	826.167.230,00	
7	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN	16.985.574.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

AHYU SUHENDRA, SE
Penata Tk I
NIP. 19711209 200012 1 006

Pihak Pertama

Drs. AKBAR PRABOWO, M.Si
Penata Tk I
NIP.19790919 200012 1 003

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RANDY DIO LESMANA, MM**
Jabatan :KEPALA SUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Selanjutnya disebut juga pihak pertama
Nama : **AHYU SUHENDRA, SE**
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,
Pihak Pertama

Pihak Kedua,

AHYU SUHENDRA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19711209 200012 1 006

RANDY DIO LESMANA, MM
Penata
NIP. 19850423 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran	Indikator	Target
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	12 Bulan
2	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset	Tersedianya Penyusunan Laporan Aset	12 Bulan

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Keuangan Semesteran		
2	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan		
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset		

Pekanbaru,

Pihak Kedua

AHYU SUHENDRA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19711209 200012 1 006

Pihak Pertama

RANDY DIO LESMANA, MM
Penata
NIP. 19850423 201001 1 013

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HARISON, S.Sos**
Jabatan : KEPALA SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya disebut juga Pihak Pertama

Nama : **AHYU SUHENDRA, SE**
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
AHYU SUHENDRA, SE	**HARISON, S.Sos**
Penata Tingkat I	**Penata Tingkat I**
NIP. 19711209 200012 1 006	**NIP. 19661201 198803 1 007**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran	Indikator	Target
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan
3	Terlaksananya Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Bulan
4	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	12 bulan
6	Terlaksananya Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	12 bulan
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan
8	Terlaksananya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	Tersedianya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	12 bulan
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			
9	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan
10	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
11	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	Tersedianya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	12 bulan
12	Terlaksananya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	12 Kab/ Kota
13	Terlaksananya Pelaksanaan Zona Integritas	Tersedianya Pelaksanaan Zona Integritas	
14	Terlaksananya Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi	Tersedianya Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi	12 bulan
15	Terlaksananya Pembayaran Gaji Guru Bantu	Tersedianya Pembayaran Gaji Guru Bantu	12 bulan, 3.645 Orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
16	Terlaksananya Peningkatan Sistem Manajemen SDM	Tersedianya Peningkatan Sistem Manajemen SDM	12 Bulan
17	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal dan Informal	Tersedianya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	12 Bulan
18	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	Tersedianya Pembinaan Jasmani dan Rohani	12 Bulan

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2.152.200.000,00	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.036.000.000,00	
3	Penyediaan Makanan Dan Minuman	250.000.000,00	
4	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	900.000.000,00	
5	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	1.120.000.000,00	
6	Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	1.730.372.900,00	
7	Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	400.000.000,00	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	400.000.000,00	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000,00	
10	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	489.988.000,00	
11	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	250.000.000,00	
12	Pendidikan Dan Pelatihan Formal dan Informal	146.702.400,00	
13	Pembinaan Jasmani dan Rohani	350.000.000,00	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.390.000.000,00	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	
16	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT, Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	300.000.000,00	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.108.538.100,00	
18	Penyediaan Alat Tulis Kantor	978.471.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

AHYU SUHENDRA, SE
Penata Tk I
NIP. 19711209 200012 1 006

Pihak Pertama

HARISON, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19661201 198803 1 007

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **HENDRI ANOF, SE, MM**
Jabatan	: KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: **RUDYANTO, SH, M.Si**
Jabatan	: KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
RUDYANTO, SE, M.Si	**HENDRI ANOF, SE, MM**
Pembina Tingkat I	**Pembina Tingkat I**
NIP. 19680312 199403 1 004	**NIP. 19651127 199803 1 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	7 Kegiatan
2	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS)	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	22 Kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Pendidikan Menengah	**500.000.000**	
1	PPDB On Line SMA/SMK	500.000.000	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**50.066.662.600**	
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	1.382.341.500	
3	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	840.883.600	
4	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	98.947.000	
5	Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	847.866.000	
6	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	832.632.800	
7	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	1.277.278.000	
8	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/SMP dan UJIAN PAKET A/B/C	670.196.050	
9	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	1.282.048.600	
10	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	1.085.453.600	
11	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	24.247.268.350	
12	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	8.401.747.100	
13	Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	9.100.000.000	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

Pihak Pertama

HENDRI ANOF, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651127 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **Drs. MURAD, M.Si**
Jabatan	: KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: **HENDRI ANOF, SE, MM**
Jabatan	: KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HENDRI ANOF, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651127 199803 1 004

Pekanbaru,
Pihak Pertama

Drs. MURAD, M.Si
Pembina
NIP. 19660420 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Pendidikan Menengah			
1	Terlaksananya PPDB On Line SMA/SMK	Tersedianya PPDB On Line SMA/SMK	140 Sekolah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	300 orang
3	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	180 orang
4	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	Jumlah Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	36 orang (3 cabang)

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	1.382.341.500	
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	840.883.600	
3	PPDB On Line SMA/SMK	500.000.000	
4	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	98.947.000	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

HENDRI ANOF, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19631127 199803 1 004

Pihak Pertama

Drs. MURAD, M.Si
Pembina
NIP. 19660420 199303 1 007

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **T. INDRIANY NOVITALIA, S.Sos. MH**

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENDRI ANOF, SE, MM**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HENDRI ANOF, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651127 199803 1 004

Pekanbaru,
Pihak Pertama

T. INDRIANY NOVITALIA, S.Sos,MH
Penata Tingkat I
NIP. 19791124 200604 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
1	Meningkatnya Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	Tersedianya Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	12 Bulan
2	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	6 Cabang (12 orang)

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Meningkatkan Kapasitas Dewan pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	847.866.000	
2	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	832.632.800	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

HENDRI ANOF, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651127 199803 1 004

Pihak Pertama

T. INDRIANY NOVITALIA, S.Sos, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19791124 200604 2 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **MURZIANDRI SAPUTRA, M.Pd**
Jabatan	: KEPALA SEKSI TUGAS PEMBANTUAN FASILITASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: **HENDRI ANOF, SE, MM**
Jabatan	: KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
HENDRI ANOF, SE, MM	**MURZIANDRI SAPUTRA, M.Pd**
Pembina Tingkat I	**Penata Muda Tingkat I**
NIP. 19651127 199803 1 004	**NIP. 19850720 201001 1 010**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1			
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		**Indikator**	**Target**
1	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	144 orang
2	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/SMP dan	Jumlah Siswa yang mengikuti (USBN) SD/SMP dan Ujian Paket	2.054 orang
3	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	288 Orang
4	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	Jumlah Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan dalam Provinsi	2.913 orang
5	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	Jumlah Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	382 orang
6	Terlaksananya Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Jumlah Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	897 orang
7	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	5 Cabang (10 orang)

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	1.277.278.000	
2	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/SMP dan UJIAN PAKET	670.196.050	
3	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	1.282.048.600	
4	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	1.085.453.600	
5	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	24.247.268.350	
6	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	8.401.747.100	
7	Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	9.100.000.000	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

HENDRI ANOF, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651127 199803 1 004

Pihak Pertama

MURZIANDRI SAPUTRA, M.Pd
Penata
NIP. 19850720 201001 1 010

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HAFES TIMTIM, AP**
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDYANTO, SH, M.Si**
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
RUDYANTO, SH, M.Si	**HAFES TIMTIM, AP**
Pembina Tingkat. I	**Penata Tingkat I**
NIP. 19680312 199403 1 004	**NIP. 19760208 199412 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	4 Kegiatan
2	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	23 Kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangn
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**10.899.081.400**	
1	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	1.580.524.000	
2	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	2.675.505.000	
3	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	576.346.400	
4	Kualifikasi S2 Terakreditasi	6.066.706.000	
	Program Pendidikan Menengah	**654.203.299.100**	
5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	242.634.600.000	
6	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	236.483.982.600	
7	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	1.955.452.300	
8	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	93.216.800	
9	Lomba Karya Tulis Ilmiah Untuk Jenjang SMA	590.087.800	
10	Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK Provinsi Riau	588.265.600	
11	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	778.409.000	
12	Pelatiihan Guru Bimbingan UKS SMA	196.300.200	
13	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	484.572.800	
14	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	33.208.970.000	
15	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	2.939.110.000	
16	Peningkatan Infrastruktur SMA	8.124.766.000	
17	Pembangunan Pagar SMA	10.283.480.000	
18	Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	1.675.000.000	
19	Pembangunan Perpustakaan	999.880.000	
20	Peningkatan USB SMA dan Kelengkapannya	30.640.044.000	
21	Rehabilitas Sedang/ Berat Ruang Kelas SMA	5.166.032.000	
22	Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA	1.720.858.000	
23	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	23.966.996.000	
24	Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	489.958.000	

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangn
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	2.999.880.000	
26	Pengadaan Alat Kesenian SMA	196.802.000	
27	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	47.986.636.000	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

Pihak Pertama

HAFES TIMTIM, AP
Penata Tingkat I
NIP. 19760208 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **NENDRA FEBRIYATNA, S.Kom, M.Si**
Jabatan	: KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMA

Selanjutnya disebut juga Pihak Pertama

Nama	: **HAFES TIMTIM, AP**
Jabatan	: KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
HAFES TIMTIM, AP	**NENDRA FEBRIYATNA, S.Kom, M.Si**
Penata Tingkat I	**Penata**
NIP. 19760208 199412 1 001	**NIP. 19880519 200701 1 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Pendidikan Menengah			
1	Terlaksananya Penyelenggaran Pendidikan SMA (DAK)	Tersedianya Penyelanggaraan Pendidikan SMA (DAK)	103 Sekolah
2	Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	Tersedianya Mebeuler Sekolah SMA	15 Sekolah
3	Terlaksanaanya Peningkatan Infrastruktur SMA	Tersedianya Infrastruktur SMA	12 Sekolah
4	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMA	Tersedianya Pagar SMA	34 Sekolah
5	Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	Tersedianya Alat Peraga IPA SMA	22 Sekolah
6	Terlaksananya Pembangunan USB SM	Jumlah Pembangunan USB	5 Sekolah
7	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Jumlah Pembangunan RKB	47 Sekolah
8	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	1 Sekolah
9	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	Tersedianya Prasarana Labor IPA SMA	10 Sekolah
10	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Media Pembelajaran SMA	46 Sekolah
11	Pembangunan Perpustakaan	Tersedianya Ruangan Perpustakaan SMA	1 Sekolah

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaran Pendidikan SMA (DAK)	33.208.970.000,00	
2	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	2.939.110.000,00	
3	Peningkatan Infrastruktur SMA	8.124.766.000,00	
4	Pembangunan Pagar SMA	10.283.480.000,00	
5	Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	1.675.000.000,00	
6	Pembangunan USB SMA dan Kelengkapanya	30.640.044.000,00	
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	23.966.996.000,00	
8	Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	489.958.000,00	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	2.999.880.000,00	
10	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	47.986.636.000,00	
11	Pembangunan Perpustakaan	999.880.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

HAFES TIMTIM, AP
Penata Tingkat I
NIP. 19760281 99412 1 001

Pihak Pertama

NENDRA FEBRIYATNA, S.Kom, M.Si
Penata
NIP. 19770201 200604 1 004

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **TEDDY KURNIAWAN, S.STP, M.Si**
Jabatan	: KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: **HAFES TIMTIM, AP**
Jabatan	: KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
HAFES TIMTIM, AP	**TEDDY KURNIAWAN, S.STP, M.Si**
Penata Tingkat I	**Penata**
NIP. 19760208 199412 1 001	**NIP. 19850104 200602 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
1	Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tersedianya Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	30 orang
2	Terlaksananya Kualifikasi S2 Terakreditasi	Tersedianya Kualifikasi S2 Terakreditasi	112 Orang
Program Pendidikan Menengah			
3	Festival Lomba Seni Siswa Nasioal (FLS2N) SMA	Tersedianya Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2SN) SMA	12 Kab/Ko (6 Mendali)
4	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	Tersedianya Kurikulum 2013 SMA	12 Kab/ Kota (280) Guru
5	Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	Tersedianya Guru Bimbingan Konseling SMA	12 Kab/Ko (60 Guru)
6	Terlaksananya MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	Jumlah Guru yang mengikuti MGMP Mata Pelajaran SMA	12 Kab/Ko (150 Guru)
7	Rehabilitas Sedang/ Berat Ruang Kelas SMA	Tersedianya Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas SMA	10 Kabupaten (20 sekolah)

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Festival Lomba Seni Siswa Nasioal (FLS2N) SMA	1.580.524.000,00	
2	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	778.409.000,00	
3	Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	196.300.200,00	
4	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	484.572.800,00	
5	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	576.346.400,00	
6	Kualifikasi S2 Terakreditasi	6.066.706.000,00	
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SMA	5.166.032.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

HAFES TIMTIM, AP
Penata Tingkat I
NIP. 197602[illegible]199412 1 001

Pihak Pertama

TEDDY KURNIAWAN, S.STP, M.Si
Penata
NIP. 19850104 200602 1 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **HENDRA HADISUARNO, S.Sos**
Jabatan	: KEPALA SEKSI PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK SMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: **HAFES TIMTIM, AP**
Jabatan	: KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
HAFES TIMTIM, AP	**HENDRA HADISUARNO, S.Sos**
Penata Tingkat I	**Penata Tingkat I**
NIP. 19760208 199412 1 001	**NIP. 19631231 199101 1 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
1	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	1 Kegiatan
2	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Nasional SMA/MA/SMK	12 Kab/Kota
3	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) SMA	12 Kab/ Kota
4	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	Jumlah sekolah yang mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	1 Kegiatan
5	Terlaksanaaanya Pengadaan Alat Kesenian SMA	Jumlah Alat Kesenian SMA	12 Kab/Kota
6	Terlaksanaanya Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK Provinsi Riau	Jumlah Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/MA/SMK	8 Bidang Lomba
Program Pendidikan Menengah			
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah Siswa yang diberi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12 Kab/Kota
8	Terlaksananya Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	Tersedianya Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan BOS	12 Kab/Kota
9	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA	Tersedianya Prasarana Gedung Sekolah SMA	1 Paket

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	242.634.600.000,00	
2	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	236.483.982.600,00	
3	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	1.955.452.300,00	
4	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	93.216.800,00	
5	Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	590.087.800,00	
6	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	2.675.505.000,00	
7	Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK Provinsi Riau	588.265.600,00	
8	Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA	1.720.858.000,00	
9	Pengadaan Alat Kesenian SMA	196.802.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

HAFES TIMTIM, AP
Penata Tingkat I
NIP. 19760228 199412 1 001

Pihak Pertama

HENDRA HADISUARNO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19631231 199101 1 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **AIDIL ADHARI, S.STP**
Jabatan	: KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	: **RUDYANTO, SH, M.Si**
Jabatan	: KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
RUDYANTO, SH, M.S.i	**AIDIL ADHARI, S.STP**
Pembina Tingkat I	**Penata Tingkat I**
NIP. 19680312 199403 1 004	**NIP. 19800202 199912 1 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	3 Kegiatan
2	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	12 Kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**6.799.832.400,00**	
1	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	1.666.735.300,00	
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	1.260.097.100,00	
3	Pembangunan Pagar SMK	3.873.000.000,00	
	Program Pendidikan Menengah	**133.508.448.566,67**	
4	Penyelenggaran Pendidikan SMK (DAK)	39.816.043.000,00	
5	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	1.759.319.300,00	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	1.477.863.700,00	
7	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	6.024.000.000,00	
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	34.431.890.200,00	
9	Pengadaan Alat Labor SMK	1.168.450.500,00	
10	MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	496.254.600,00	
11	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	30.914.000.000,00	
12	Peningkatan Infrastruktur SMK	5.396.666.666,67	
13	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	4.478.960.600,00	
14	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	3.489.000.000,00	
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	4.056.000.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

Pihak Pertama

AIDIL ADHARI, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19800202 199912 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. PAHMIJAM, M.Pd**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK SMK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AIDIL ADHARI, S.STP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
AIDIL ADHARI, S.STP	**Drs. PAHMIJAN, M.Pd**
Penata Tingkat I	**Pembina**
NIP. 19800202 199912 1 002	**NIP. 19660205 199702 1 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
1	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Tersedianya Perlombaan Olahraga Nasional (O2SN) SMK	30 Orang
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Tersedianya Perlombaan Seni Siswa Nasional (FLS2SN) SMK	9 Bidang lomba
Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus			
1	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	Tersedianya Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi	130 Mahasiswa

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	1.666.735.300	
2	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	3.489.000.000	
3	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	1.260.097.100	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

AIDIL ADHARI S.STP
PenataTingkat I
NIP. 19800202 199912 1 002

Pihak Pertama

Drs. PAHMIJAN, M.Pd
Pembina
NIP. 19660205 199702 1 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ERLI OKTAS SENIORITHA, S.IP**

Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AIDIL ADHARI, S.STP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua

AIDIL ADHARI, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19800202 199912 1 002

Pihak Pertama

ERLI OKTAS SENIORITHA, S.IP
Penata
NIP. 19871012 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Pendidikan Menengah			
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	1 Sekolah
2	Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	Jumlah Mebeuler Sekolah SMK	9 Sekolah
3	Terlaksananya Penyelenggaran Pendidikan SMK (DAK)	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	59 Sekolah
4	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMK	Tersedianya Media Pembelajaran SMK	59 Sekolah
5	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	41 Sekolah
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	1 Kegiatan
7	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMK	Jumlah Pembangunan Pagar SMK	5 Sekolah
8	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur SMK	Tersedianya Peningkatan Infrastruktur SMK	105 Orang
9	Pengadaan Alat Labor SMK	Tersedianya Alat Labor SMK	4 Sekolah
10	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	83 Ruang

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	1.477.863.700,00	
2	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	1.759.319.300,00	
3	Penyelenggaran Pendidikan SMK (DAK)	39.816.043.000,00	
4	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	30.914.000.000,00	
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	34.431.890.200,00	
6	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	6.024.000.000,00	
7	Pembangunan Pagar SMK	3.873.000.000,00	

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
8	Peningkatan Infrastruktur SMK	5.396.666.666,67	
9	Pengadaan Alat Labor SMK	1.168.450.500,00	
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	4.056.000.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

AIDIL ADHARI S.STP
PenataTingkat I
NIP. 19800202 199912 1 002

Pihak Pertama

ERLY OKTA SENIORITHA, S.IP
Penata
NIP. 19871012 200701 2 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUBARAT SALEH, S.Pd, M.Pd**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN PNDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AIDIL ADHARI, S.STP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua	Pihak Pertama
AIDIL ADHARI, S.STP	**MUBARAT SALEH, S.Pd. M.Pd**
Penata Tingkat I	**Pembina**
NIP. 19800202 199912 1 002	**NIP. 19750817 199311 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
1	Terlaksananya MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	Jumlah Guru yang mengikuti MGMP Mata Pelajaran SMK	60 orang
Program Pendidikan Pendidikan Menengah			
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	160 Siswa

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	496.254.600	
2	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	4.478.960.600	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

AIDIL ADHARI S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19800202 199912 1 002

Pihak Pertama

MUBARAT SALEH, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19700414 199512 1 002

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KAIFI AZMI, AP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :**RUDYANTO, SH, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua	Pihak Pertama
RUDYANTO, SH, M.Si	**KAIFI AZMI, A.P**
Pembina Tingkat I	**Pembina Tingkat I**
NIP. 19680312 199403 1 004	**NIP. 19730707 199311 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	2 Kegiatan
2	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	
3	Meningkatnya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Terlaksananya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	25 Kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**5.601.229.600**	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan PKPLK	4.773.422.000	
2	Apresiasi GTK Paud Dikmas dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	827.807.600	
	Program Pendidikan Menengah	**16.181.575.000**	
3	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	5.496.439.000	
4	Penyelenggaraan Pendidikan SMA NEGERI PLUS Provinsi Riau	5.697.300.000	
5	Penyelenggaraan SMA Pintar	4.987.836.000	
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**8.115.534.030**	
6	Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	400.000.000	
7	Pengadaan Alat Kesenian PKPLK	250.000.000	
8	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	1.947.968.930	
9	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	573.632.200	
10	Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	442.625.700	
11	Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	539.857.200	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	923.200.000	
13	Pengadaan Meubiler SLB	1.763.000.000	
14	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	1.275.250.000	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680312 199403 1 004

Pihak Pertama

KAIFI AZMI, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19730707 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ASRIL ARIEF, S.Sos**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PKPLK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KAIFI AZMI, AP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KAIFI AZMI, AP	**ASRIL ARIEF, S.Sos**
Pembina Tingkat. I	**Pembina Tingkat. I**
NIP. 19730707 199311 1 001	**NIP. 19730707 199311 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Pendidikan Menengah			
1	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	Tersedianya Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	204 orang
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
2	Terlaksananya Apresiasi GTK Paud Dikmas dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	Tersedianya Apresiasi GTK Paud Dikmas dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	13 GTK Paud (156 orang)
3	Terlaksananya Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	Tersedianya Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	240 orang
4	Terlaksanaanya Pengadaan Alat Kesenian PKPLK	Tersedianya Alat Kesenian PKPLK	1 Sekolah

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	4.773.422.000	
2	Apresiasi GTK Paud Dikmas dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	827.807.600	
3	Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	442.625.700	
4	Pengadaan Alat Kesenian PKPLK	250.000.000	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

KAFFI AZMI, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730707 199311 1 001

Pihak Pertama

ASRIL ARIEF, S.Sos
Pembina
NIP. 19710731 199803 1 007

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **O.K.MHD. SONNY ATMAJAYA, M.Si**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK PKPLK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KAIFI AZMI, AP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua,

KAIFI AZMI, AP
Pembina Tingkat. I
NIP. 19620311 1989032 006

Pihak Pertama

O.K MHD. SONNY ATMAJAYA
Penata
NIP. 19781105 201102 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
1	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	157 Siswa
2	Terlaksananya Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	Jumlah yang mengikuti Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	4 Bidang Lomba (175 orang Tk. Provinsi dan 40 untuk Tk. Nasional
3	Terlaksananya Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	Jumlah yang mengikuti Festifal Inovasi dan Kreaktifitas PKPLK	6 Bidang Lomba
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	300 Siswa

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	573.632.200	
2	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	1.947.968.930	
3	Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	539.857.200	
4	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	5.496.439.000	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

KAIFI AZMI, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730707 199311 1 001

Pihak Pertama

O.K. MHD. SONNY ATMAJAYA, M.Si
Penata
NIP. 19781105 201102 1 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HANGGI MAISYA FIRDAUS, S.IP**

Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PKPLK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KAIFI AZMI, AP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KAIFI AZMI, AP	**HANGGI MAISYA FIRDAUS, S.IP**
Pembina Tingkat I	**Penata Muda Tingkat I**
NIP. 19730707 199311 1 001	**NIP. 19880519 200701 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA NEGERI PLUS Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	300 Siswa
2	Terlaksananya Penyelenggaraan SMA Pintar	Tersedianya Penyelenggaraan SMA Pintar	216 Siswa
3	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	Tersedianya Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	3 Sekolah
4	Terlaksana Pengadaan Meubiler SLB	Tersedianya Meubiler SLB	13 Sekolah
5	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	Tersedianya Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	12 Bulan
6	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	12 Bulan

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pendidikan SMA NEGERI PLUS Provinsi Riau	5.697.300.000,00	
2	Penyelenggaraan SMA Pintar	4.987.836.000,00	
3	Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	400.000.000,00	
4	Pengadaan Meubiler SLB	1.763.000.000,00	
5	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	1.275.250.000,00	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	923.200.000,00	

Pekanbaru,

Pihak Kedua

KAIFI AZMI, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730707 199311 1 001

Pihak Pertama

HANGGI MAISYA FIRDAUS, S.IP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19880519 200701 1 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680312 199403 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 (ESELON IV)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
Sekretariat								
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	2.152.200.000	1.602.875.122	74,48%
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1.036.000.000	592.070.000	57,15%
3	Terlaksananya Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	250.000.000	238.095.000	95,24%
4	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	900.000.000	878.654.352	97,63%
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1.120.000.000	932.500.000	83,26%
6	Terlaksananya Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1.730.372.900	1.037.729.453	59,97%
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	978.471.000	799.499.690	81,71%
8	Terlaksananya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	Tersedianya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	400.000.000	340.180.000	85,05%
9	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	400.000.000	264.700.000	66,18%
10	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	500.000.000	315.619.850	63,12%
11	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	Tersedianya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	489.988.000	437.798.000	89,35%
12	Terlaksananya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	100,00%	250.000.000	199.711.000	79,88%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
13	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal dan Informal	Tersedianya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	146.702.400	114.706.200	78,19%
14	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	Tersedianya Pembinaan Jasmani dan Rohani	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	350.000.000	274.406.000	78,40%
15	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	305.000.000	274.777.000	90,09%
16	Terlaksananya Pengadaan Kelender Pendidikan	Tersedianya Pengadaan Kelender Pendidikan	17047 eks	17047 eks	100,00%	295.367.000	277.827.600	94,06%
17	Pengelolaan Data Pendidikan	Tersedianya Data Pokok Pendidikan	200 Buku Profil	200 Buku Profil	100,00%	1.086.777.100	313.190.700	28,82%
18	Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastuktur Berbasis Mading Digital Interaktif	Tersedianya Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastuktur Berbasis Mading Digital Interaktif	3 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	162.000.000	-	0,00%
19	Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	Terlaksananya Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	1.433.904.400	96.418.100	6,72%
20	Terlaksananya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	12 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	100,00%	826.167.230	794.559.800	96,17%
21	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	Terlaksananya Sistem Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	10 Sekolah	10 Sekolah	100,00%	16.985.574.000	14.820.114.250	87,25%
BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS								
1	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1.955.452.300	1.701.690.959	87,02%
2	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Nasional SMA/MA/SMK	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100,00%	93.216.800	90.600.000	97,19%
3	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) SMA	12 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	100,00%	2.675.505.000	2.573.942.800	96,20%
4	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	Jumlah sekolah yang mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	590.087.800	257.867.002	43,70%
5	Terlaksanaaanya Pengadaan Alat Kesenian SMA	Jumlah Alat Kesenian SMA	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100,00%	196.802.000,00	189.849.600,00	96,47%
6	Terlaksanaanya Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK Provinsi	Jumlah Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/MA/SMK	8 Bidang Lomba	0 Bidang Lomba	0,00%	588.265.600	29.027.600	4,93%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah Siswa yang diberi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100,00%	263.379.160.000	262.770.123.658	99,77%
8	Terlaksananya Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS	Tersedianya Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan BOS	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100,00%	236.483.982.600	235.922.028.400	99,76%
9	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA	Tersedianya Prasarana Gedung Sekolah SMA	1 Paket	0 Paket	0,00%	1.720.858.000	72.951.800	4,24%
10	Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tersedianya Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	30 orang	30 orang	100,00%	576.346.400	473.939.700	82,23%
11	Terlaksananya Kualifikasi S2 Terakreditasi	Tersedianya Kualifikasi S2 Terakreditasi	112 Orang	112 Orang	100,00%	6.066.706.000	3.600.248.700	59,34%
12	Festival Lomba Seni Siswa Nasioal (FLS2N) SMA	Tersedianya Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2SN) SMA	6 Medali	6 Medali	100,00%	1.580.524.000	1.369.533.600	86,65%
13	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	Tersedianya Kurikulum 2013 SMA	280 Guru	280 Guru	100,00%	778.409.000	754.212.606	96,89%
14	Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	Tersedianya Guru Bimbingan Konseling SMA	60 Guru	50 Guru	83,33%	196.300.200	142.244.150	72,46%
15	Terlaksananya MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	Jumlah Guru yang mengikuti MGMP Mata Pelajaran SMA	150 Guru	150 Guru	100,00%	484.572.800	470.616.000	97,12%
16	Rehabilitas Sedang/ Berat Ruang Kelas SMA	Tersedianya Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas SMA	20 sekolah	12 sekolah	60,00%	5.166.032.000	2.415.799.886	46,76%
17	Terlaksananya Penyelenggaran Pendidikan SMA (DAK)	Tersedianya Penyelanggaraan Pendidikan SMA (DAK)	103 Sekolah	103 Sekolah	100,00%	33.208.970.000	32.343.037.660	97,39%
18	Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	Tersedianya Mebeuler Sekolah SMA	15 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	2.939.110.000	-	0,00%
19	Terlaksanaanya Peningkatan Infrastruktur SMA	Tersedianya Infrastruktur SMA	12 Sekolah	8 Sekolah	66,67%	8.124.766.000	1.913.427.900	23,55%
20	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMA	Tersedianya Pagar SMA	34 Sekolah	14 Sekolah	41,18%	10.283.480.000	2.933.238.800	28,52%
21	Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	Tersedianya Alat Peraga IPA SMA	22 Sekolah	10 Sekolah	45,45%	1.675.000.000	1.595.140.532	95,23%
22	Terlaksananya Pembangunan USB SMA dan Kelengkapanya	Jumlah Pembangunan USB	5 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	30.640.044.000	238.740.680	0,78%
23	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Jumlah Pembangunan RKB	47 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	23.966.996.000	945.002.362	3,94%
24	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	1 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	489.958.000	18.002.800	3,67%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
25	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	Tersedianya Prasarana Labor IPA SMA	10 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	2.999.880.000	10.386.000	0,35%
26	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Media Pembelajaran SMA	46 Sekolah	46 Sekolah	100,00%	47.986.636.000	37.351.308.035	77,84%
27	Pembangunan Perpustakaan	Tersedianya Ruangan Perpustakaan SMA	1 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	999.880.000	1.909.100	0,19%
BIDANG SEKOLAH MEMENGAH KEJURUAN								
1	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Tersedianya Perlombaan Olahraga Nasional (O2SN) SMK	30 30 Orang	30 Orang	100,00%	1.666.735.300	1.213.935.500	72,83%
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Tersedianya Perlombaan Seni Siswa Nasional (FLS2SN) SMK	9 Bidang lomba	9 Bidang lomba	100,00%	1.260.097.100	867.677.350	68,86%
3	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	Tersedianya Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi	130 Mahasiswa	130 Mahasiswa	100,00%	3.489.000.000	2.691.813.824	77,15%
4	Terlaksananya MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	Jumlah Guru yang mengikuti MGMP Mata Pelajaran SMK	60 orang	60 orang	100,00%	496.254.600	413.414.500	83,31%
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	160 Siswa	160 Siswa	100,00%	4.478.960.600	3.780.822.162	84,41%
6	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	1 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	1.477.863.700	44.962.700	3,04%
7	Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	Jumlah Mebeuler Sekolah SMK	9 Sekolah	8 Sekolah	88,89%	1.759.319.300	1.508.374.300	85,74%
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	59 Sekolah	59 Sekolah	100,00%	39.816.043.000	32.937.724.942	82,72%
9	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMK	Tersedianya Media Pembelajaran SMK	59 Sekolah	47 Sekolah	79,66%	30.914.000.000	16.094.558.733	52,06%
10	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	41 Sekolah	16 Sekolah	39,02%	34.431.890.200	8.212.990.610	23,85%
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	6.024.000.000	5.737.535.662	95,24%
12	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMK	Jumlah Pembangunan Pagar SMK	5 Sekolah	5 Sekolah	100,00%	3.873.000.000	3.630.007.700	93,73%
13	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur SMK	Tersedianya Peningkatan Infrastruktur SMK	105 Orang	22 Orang	20,95%	5.396.666.667	3.820.572.100	70,80%
14	Pengadaan Alat Labor SMK	Tersedianya Alat Labor SMK	4 Sekolah	4 Sekolah	100,00%	1.168.450.500	57.987.200	4,96%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
15	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	83 Ruang	10 Ruang	12,05%	4.056.000.000	1.517.532.650	37,41%
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS								
1	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	157 Siswa	157 Siswa	100,00%	573.632.200	517.848.200	90,28%
2	Terlaksananya Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	Jumlah yang mengikuti Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	175 4 Bidang Lomba (175 orang Tk. Provinsi dan 40 untuk Tk. Nasional	175 4 Bidang Lomba (175 orang Tk. Provinsi dan 40 untuk Tk. Nasional	100,00%	1.947.968.930	1.826.712.450	93,78%
3	Terlaksananya Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	Jumlah yang mengikuti Festifal Inovasi dan Kreaktifitas PKPLK	6 Bidang Lomba	6 Bidang Lomba	100,00%	539.857.200	526.907.200	97,60%
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	300 Siswa	300 Siswa	100,00%	5.496.439.000	5.420.839.593	98,62%
5	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	Tersedianya Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	204 orang	204 orang	100,00%	4.773.422.000	4.719.964.600	98,88%
6	Terlaksananya Apresiasi GTK Paud Dikmas dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	Tersedianya Apresiasi GTK Paud Dikmas dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se- Provinsi Riau	156 156 orang (GTK Paud)	156 156 orang (GTK Paud)	100,00%	827.807.600	773.965.600	93,50%
7	Terlaksananya Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	Tersedianya Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	240 orang	240 orang	100,00%	442.625.700	382.374.200	86,39%
8	Terlaksanaanya Pengadaan Alat Kesenian PKPLK	Tersedianya Alat Kesenian PKPLK	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00%	250.000.000	242.494.300	97,00%
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA NEGERI PLUS Provinsi Riau	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	300 Siswa	300 Siswa	100,00%	5.697.300.000	4.921.347.500	86,38%
10	Terlaksananya Penyelenggaraan SMA Pintar	Tersedianya Penyelenggaraan SMA Pintar	216 Siswa	216 Siswa	100,00%	4.987.836.000	4.318.153.761	86,57%
11	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	Tersedianya Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	3 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	400.000.000	26.985.000	6,75%
12	Terlaksana Pengadaan Meubiler SLB	Tersedianya Meubiler SLB	13 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	1.763.000.000	43.080.000	2,44%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi target	Capaian Target	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
13	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	Tersedianya Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1.275.250.000	1.139.111.338	89,32%
14	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	923.200.000	449.083.327	48,64%
BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN								
1	Terlaksananya PPDB On Line SMA/SMK	Tersedianya PPDB On Line SMA/SMK	140 Sekolah	0 Sekolah	0,00%	500.000.000	-	0,00%
2	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	300 orang	300 orang	100,00%	1.382.341.500	1.116.949.900	80,80%
3	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	180 orang	180 orang	100,00%	840.883.600	685.337.400	81,50%
4	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	Jumlah Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	36 36 orang (3 cabang)	36 36 orang (3 cabang)	100,00%	98.947.000	55.164.000	55,75%
5	Meningkatnya Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	Tersedianya Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	847.866.000	468.966.700	55,31%
6	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	6 Cabang	6 Cabang	100,00%	832.632.800	619.306.300	74,38%
7	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	144 orang	144 orang	100,00%	1.277.278.000	1.034.457.467	80,99%
8	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/SMP dan	Jumlah Siswa yang mengikuti (USBN) SD/SMP dan Ujian Paket	2054 orang	0 orang	0,00%	670.196.050	-	0,00%
9	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	288 Orang	288 Orang	100,00%	1.282.048.600	1.003.202.200	78,25%
10	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi	Jumlah Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan dalam Provinsi	2913 orang	2913 orang	100,00%	24.247.268.350	16.344.051.200	67,41%
11	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	Jumlah Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	382 orang	382 orang	100,00%	8.401.747.100	3.323.194.752	39,55%
12	Terlaksananya Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Jumlah Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	897 orang	897 orang	100,00%	9.100.000.000	8.321.246.000	91,44%
13	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	5 Cabang (10 orang)	5 Cabang (10 orang)	100,00%	1.085.453.600	920.249.175	84,78%

INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN REVISI RENSTRA 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan /Formulasi penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
1	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C	Jumlah Siswa SMA/MA/SMLB/Paket C x 100% / Jumlahl Penduduk Usia 16-18 Th	KEMENDIKBUD	Dinas Pendidikan Provinsi Riau
2	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C	Jumlah Siswa SMA/MA/SMLB/Paket C usia 16-18 Th x 100% / Jml Penduduk Usia 16-18 Th		

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

RUDYANTO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 196403 1 004